



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA PENUNJANG KEPOLISIAN RESOR SAMPANG TAHUN 2025 - 2029

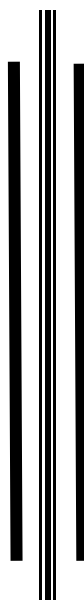


KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAMPANG
NOMOR: KEP/60/X/ 2025, TANGGAL 6 OKTOBER 2025





MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA PENUNJANG KEPOLISIAN RESOR SAMPANG TAHUN 2025 - 2029



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAMPANG
NOMOR: KEP/60/X/ 2025, TANGGAL 6 OKTOBER 2025





KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAMPANG

Nomor: Kep/60/X/2025

tentang

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA PENUNJANG
KEPOLISIAN RESOR SAMPANG TAHUN 2025-2029

KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAMPANG

Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan Manual Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Penunjang Kepolisian Resor Sampang Tahun 2025-2029, dipandang perlu menetapkan keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2029;
 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 4. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
 7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
 8. Perkiraan Intelijen Keamanan Polres Sampang tahun 2025-2029.

Memperhatikan.....



- Memperhatikan:
1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 2. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: Kep/295/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025 tentang Rencana Strategis Kepolisian Daerah Jawa Timur Tahun 2025-2029;
 3. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: Kep/357/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 tentang Manual Indikator Kinerja Utama Dan Indikator Kinerja Penunjang Kepolisian Daerah Jawa Timur Tahun 2025-2029;
 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2024-2029;

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAMPANG TENTANG MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA PENUNJANG KEPOLISIAN RESOR SAMPANG TAHUN 2025-2029.

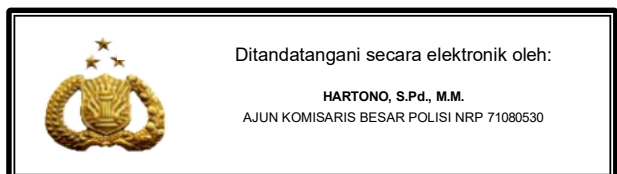
1. penetapan Manual IKU dan IKP Kepolisian Resor Sampang Tahun 2025-2029 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) Kepolisian Resor Sampang Tahun 2025-2029;
2. manual IKU dan IKP Kepolisian Resor Sampang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan alat ukur kinerja Polri, yang didesain untuk dapat menilai capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Polri dalam rangka melaksanakan misi melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat;
3. hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan tersendiri;
4. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sampang
pada tanggal: 6 Oktober 2025

KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAMPANG POLDA JATIM

Tembusan:

1. Kapolda Jatim.
2. Irwasda Polda Jatim.
3. Karorena Polda Jatim



DAFTAR ISI

	Hal
Keputusan Kapolri	-
Daftar isi.....	i
A. Manual Indikator Kinerja Polda Jatim.....	1
1. Manfaat Penyusunan Manual Indikator Kinerja	1
2. Elemen dalam Manual Indikator Kinerja	1
B. Cakupan Indikator Kinerja	2
C. Tipe <i>Template</i> Indikator Kinerja	4
D. <i>Template</i> Indikator Kinerja Induk.....	5
E. <i>Template</i> Indikator Kinerja Umum	6
Indeks Kamtibmas	
1. Indeks Kamtibmas	6
2. <i>Crime Rate</i>	7
3. Tingkat Rasa Aman Masyarakat	8
Indikator Kinerja dalam Dimensi Harkamtibmas	
1. Indeks Harkamtibmas	10
1.1 <i>Road Safety Index</i>	11
1.2 Indeks <i>Community Policing</i>	12
1.3 Tingkat Efektivitas Kehadiran Samapta Polres Sampang	14
1.4 Tingkat Keamanan di Wilayah Perairan Polres Sampang.....	16
1.5 Tingkat Efektivitas Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu	17
1.6 Persentase Reduksi Potensi Gangguan.....	19
1.7 Tingkat Keberhasilan Operasi Kepolisian.....	20
1.8 Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Polri (Aspek Harkamtibmas)	22
Indikator Kinerja dalam Dimensi Gakkum Polri	
2. Indeks Gakkum Polres Sampang	23
2.1 <i>Clearance Rate</i> Kejahatan Konvensional	24
2.2 <i>Clearance Rate</i> Kejahatan Transnasional	25
2.3 <i>Clearance Rate</i> Kejahatan terhadap Perempuan dan Anak	27
2.4 <i>Clearance Rate</i> Kejahatan Kekayaan Negara	28



2.5	<i>Clearance Rate</i> Tindak Pidana Lantas	29
2.6	<i>Clearance Rate</i> Tindak Pidana di Wilayah Perairan Polres Sampang.....	31
2.7	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Polri (Aspek Gakkum).....	32
Indikator Kinerja Penunjang		
3.	<i>Indeks Human Capital</i>	34
3.1	Indeks Profesionalitas SDM Polres Sampang.....	35
4.	<i>Indeks Infrastruktur Strategis</i>	36
4.1	Tingkat Pemenuhan <i>Minimum Essential Police Equipment (MEPE)</i>	37
5.	<i>Indeks Organization Capital</i>	38
5.1	Nilai SAKIP	39
5.2	Nilai Kinerja Anggaran	40
5.3	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Penanganan Pengaduan Masyarakat.....	41
5.4	Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang Dihadapi Polres Sampang.....	43
F.	Penutup	44



A. Manual Indikator Kinerja Polres Sampang

Setiap indikator kinerja yang digunakan dalam proses pengelolaan kinerja dalam rangka implementasi strategi organisasi, perlu dilengkapi dengan **Manual Indikator Kinerja**. Manual indikator kinerja merupakan suatu dokumen yang berisi penjelasan detail tentang indikator kinerja tersebut. Informasi yang tersaji mencakup, antara lain: definisi, formula, polarisasi, periode pemantauan, sumber data, penghimpun data, dan pengampu akuntabilitas.

1. manfaat dari penyusunan Manual Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan pemahaman yang sama tentang apa yang diukur oleh indikator kinerja tersebut dan target yang telah menjadi konsesus untuk dicapai pada suatu periode waktu tertentu;
 - b. memberikan informasi tentang area kinerja yang perlu dibenahi ketika kinerja tidak mencapai hasil yang diharapkan.

2. elemen dalam Manual Indikator Kinerja

Terdapat sejumlah elemen dalam Manual Indikator Kinerja yang secara keseluruhan memberikan informasi yang komprehensif tentang suatu indikator kinerja, yakni:

- a. indikator kinerja: pada bagian ini dicantumkan nama dari indikator kinerja yang digunakan;
- b. definisi: bagian ini berisi definisi dari indikator kinerja, termasuk pengertian sejumlah istilah yang muncul dalam definisi tersebut;
- c. formula: Bagian ini menjabarkan formula yang digunakan untuk menghitung nilai indikator kinerja. Formula diperlukan apabila indikator kinerja dihitung berdasarkan sejumlah variabel parameter, atau merupakan agregasi dari indikator sejenis di tingkat wilayah;
- d. target kinerja: bagian ini berisikan target dari indikator kinerja untuk kurun waktu 2025-2029, sesuai dengan periode Renstra Polres Sampang;
- e. satuan pengukuran: besaran yang menunjukkan kuantitas dari target dan realisasi capaian indikator kinerja;
- f. polarisasi: polarisasi menunjukkan arah capaian indikator kinerja yang kita harapkan. Polarisasi *maximize* berarti semakin besar nilai realisasi berarti

semakin baik. Sedangkan polarisasi *minimize* bermakna sebaliknya, semakin kecil nilai realisasi semakin baik;

- g. periode pemantauan: bagian ini diisi dengan periode di mana pemantauan kinerja dilakukan. Karena akan digunakan untuk keperluan monitoring dan evaluasi, maka setidaknya periode pengukuran adalah triwulanan;
- h. dimensi: dimensi menunjukkan rumpun dimana indikator kinerja tersebut berada, yakni Harkamtibmas, Gakkum atau Kinerja Penunjang;
- i. sumber data: entitas yang memberikan atau menghasilkan data kinerja yang diperlukan untuk suatu indikator kinerja. Satu indikator kinerja dapat memiliki beberapa sumber data. Sumber data dapat berupa unit kerja di internal Polres Sampang atau organisasi di luar Polres Sampang (BPK RI, Kementerian PANRB RI dan lain-lain);
- j. penghimpun data: Satuan Kerja yang bertugas untuk menghimpun data realisasi untuk indikator kinerja, dari entitas yang menjadi sumber data;
- k. pengampu akuntabilitas: Satuan Kerja atau unit organisasi yang diukur kinerjanya menggunakan indikator kinerja ini;
- l. pengesahan: tempat ditandatanganinya Manual Indikator Kinerja oleh pejabat yang berwenang dari unit organisasi yang menjadi penghimpun data atau sebagai pengampu akuntabilitas dari indikator kinerja.

B. Cakupan Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang tercakup dalam dokumen ini adalah yang digunakan untuk mengukur pencapaian Sasaran Strategis dalam Renstra Polres Sampang 2025-2029. Tabel berikut berisikan Sasaran Strategis Polres Sampang dalam Renstra 2025-2029 beserta indikator kinerjanya. Indikator kinerja yang berada pada kluster SSI (strategis, struktural dan institusional), SS1 (sasaran strategis 1), dan SS2 (Sasaran Strategis 2) merupakan **IKU (Indeks Kinerja Utama)**. Sedangkan indikator kinerja yang berada pada kelompok SS3, SS4, dan SS5 disebut dengan **IKP (Indeks Kinerja Penunjang)**.

Tabel.....

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SI	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sampang yang Terkendali, Melalui Kepolisian yang Berintegritas, Modern dan Akuntabel;	Indeks Kamtibmas Kab. Sampang 1. <i>crime rate</i> ; 2. tingkat rasa aman masyarakat.
SS1	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif;	1. Indeks Harkamtibmas Polres Sampang 1. <i>road safety index</i> ; 2. indeks <i>community policing</i> ; 3. tingkat efektivitas kehadiran Samapta Polres Sampang; 4. tingkat keamanan di wilayah perairan Polres Sampang; 5. tingkat efektivitas pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu; 6. persentase reduksi potensi gangguan; 7. tingkat keberhasilan operasi kepolisian; 8. tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polres Sampang (aspek Harkamtibmas Polres Sampang);
SS2	Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan di Wilayah Hukum Polres Sampang;	2. Indeks Gakkum Polres Sampang 1. <i>clearance rate</i> kejahatan konvensional; 2. <i>clearance rate</i> kejahatan transnasional; 3. <i>clearance rate</i> kejahatan terhadap perempuan dan anak; 4. <i>clearance rate</i> kejahatan kekayaan negara; 5. <i>clearance rate</i> tindak pidana lantasi; 6. <i>clearance rate</i> tindak pidana di wilayah perairan Polres Sampang; 7. tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polres Sampang (aspek Gakkum Polres Sampang).

No.....



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS3	Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polres Sampang yang Adaptif, Kompeten dan Berintegritas secara Terpadu dan Optimal;	3. Indeks <i>Human Capital</i> 1. indeks profesionalitas SDM Polres Sampang;
SS4	Infrastruktur Strategis Polres Sampang yang Berdaya Guna dan Modern;	4. Indeks Infrastruktur Strategis 1. tingkat pemenuhan <i>Minimum Essential Police Equipment (MEPE)</i> ;
SS5	Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel di Lingkungan Polres Sampang.	5. Indeks <i>Organization Capital</i> 1. nilai SAKIP; 2. nilai kinerja anggaran; 3. tingkat kepuasan masyarakat terhadap penanganan pengaduan masyarakat; 4. persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polres Sampang.

Indikator kinerja dengan **huruf cetak tebal** (misal **Indeks Kamtibmas**) dihitung berdasarkan rata-rata nilai indeks dari indikator kinerja yang dinaunginya. Contoh, nilai Indeks Kamtibmas dihitung dari rata-rata nilai indeks *crime rate* dan tingkat rasa aman masyarakat.

C. Tipe **Template** Indikator Kinerja

Terdapat 2 (dua) tipe *template* Manual Indikator Kinerja:

- (1) *template* untuk indikator kinerja yang menjadi induk dari indikator kinerja lain,
- (2) *template* untuk indikator kinerja yang bersifat independen, yang mana merupakan subordinat dari indikator kinerja induk. Indikator kinerja yang bersifat induk membutuhkan nilai indeks dari indikator kinerja lain untuk menghitung nilai indeks dirinya. Untuk indikator kinerja yang bersifat independen, nilai indeksnya dihitung secara independen atau mandiri.

Dalam.....

Dalam dokumen ini, terdapat enam indikator kinerja yang merupakan induk dari indikator kinerja lain, yakni: Indeks Kamtibmas, Indeks Harkamtibmas, Indeks Gakkum Polres Sampang, Indeks Human *Capital*, Indeks Infratraktur Strategis, dan Indeks *Organization Capital*. Pada tabel di atas, semua indikator kinerja yang ditandai dengan **huruf cetak tebal** adalah **indikator kinerja yang bersifat induk**. Indikator kinerja yang selebihnya bersifat umum. Masing-masing jenis indikator kinerja ini memiliki *template* yang berbeda untuk tabel perhitungan angka indeks.

D. *Template* Indikator Kinerja Induk

Indikator Kinerja						
Definisi						
Formula						
Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
Dimensi	Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi	
Sumber Data	Penghimpun Data			Pengampu Akuntabilitas		
	Pengesahan			Pengesahan		

Rentang per Level Kinerja	Nilai	Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
<nama indikator>	TW1					
	TW2					
	TW3					
	TW4					

E. *Template*.....

E. *Template* Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja						
Definisi						
Formula						
Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
Dimensi	Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi	
Sumber Data		Penghimpun Data		Pengampu Akuntabilitas		
		Pengesahan		Pengesahan		

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
<nama indikator kinerja>						

1. Indeks Kamtibmas

Indikator Kinerja	Indeks Kamtibmas
Definisi	
Indeks Kamtibmas adalah indikator yang mengukur kinerja institusi Polres Sampang secara <i>komprehensif</i> dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. * Indeks Kamtibmas mencerminkan <i>outcome</i> dari upaya Polres Sampang untuk menjalankan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) serta penegakan hukum (Gakkum). Indeks Kamtibmas berkorelasi positif dengan Indeks Harkamtibmas maupun Indeks Gakkum Polres Sampang.	

Indeks Kamtibmas dihitung berdasarkan rata-rata nilai indeks dari dua indikator berikut:						
<i>crime rate</i> atau jumlah kasus kejahatan selama setahun per 100.000 penduduk (<i>PIC</i>: Bagops Polres Sampang); - tingkat rasa aman masyarakat (<i>PIC</i>: Bagren Polres Sampang).						
Formula						
$IK = \frac{IX + IY}{2}$						
IK: Indeks Kamtibmas						
IX: nilai indeks dari <i>crime rate</i>						
IY: nilai indeks dari tingkat rasa aman masyarakat						
Fomula di atas berlaku untuk perhitungan Indeks Kamtibmas di level nasional.						
Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	2.98	3.00	3.03	3.06	3.09	3.12
Dimensi	Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi	
-	-		Triwulanan		Maximize	
Sumber Data		Penghimpun Data		Pengampu Akuntabilitas		
Bagops, Bagren , Satreskrim, Satresnarkoba, Satsamapta Polres Sampang.		Bagops Polres Sampang		Kabagops Polres Sampang		
		Pengesahan		Pengesahan		
		 JUNAIDI, S.H. AKP NRP 68110392		 JUNAIDI, S.H. AKP NRP 68110392		
Rentang per Level Kinerja	Nilai	Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Indeks Kamtibmas	TW1	1,00 – 1,99	2,00 – 2,99	3,00 – 3,99	4,00 – 4,49	4,50 – 5,00
	TW2	1,00 – 1,99	2,00 – 2,99	3,00 – 3,99	4,00 – 4,49	4,50 – 5,00
	TW3	1,00 – 1,99	2,00 – 2,99	3,00 – 3,99	4,00 – 4,49	4,50 – 5,00
	TW4	1,00 – 1,99	2,00 – 2,99	3,00 – 3,99	4,00 – 4,49	4,50 – 5,00

2. Crime Rate

Indikator Kinerja	Crime Rate
Definisi	
Crime Rate adalah jumlah kasus kejahatan per 100.000 penduduk dalam wilayah Polres Sampang. <i>Crime Rate</i> dihitung berdasarkan total kejadian kejahatan di seluruh wilayah Jawa Timur dibandingkan dengan total penduduk Polres Sampang. <i>Crime Rate</i> dimaknai sebagai risiko penduduk terkena perkara kejahatan (tindak pidana). <i>Crime Rate</i> dapat dihitung di tingkat wilayah Polres dengan menyesuaikan jumlah kejadian kejahatan dan jumlah penduduk untuk wilayah tersebut. Mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, maka yang diperhitungkan dalam <i>Crime Rate</i> adalah kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat serta mereka laporkan, meliputi: - kejahatan konvensional/nasional; - kejahatan transnasional; - pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	

Komponen.....



Komponen penilaian:

- data terkini jumlah penduduk (BPS);
- data terkini jumlah kejahatan (Subbagdalops Bagops Polres Sampang). Semua data kejahatan dan gangguan Kamtibmas dikirimkan oleh Satker kewilayahan melalui aplikasi *Daily Operation Reporting System (DORS)*.

Formula

$$CRT = \frac{\sum_{i=1}^{34} K_i \times 100.000}{\sum_{i=1}^{34} P_i}$$

CRT : jumlah kasus kejahatan per 100.000 penduduk dalam wilayah Kabupaten Sampang;

K_i : jumlah kasus kejahatan di suatu wilayah Polres;

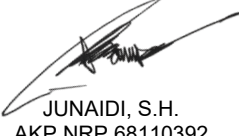
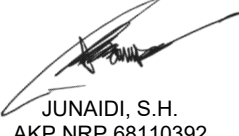
P_i : jumlah penduduk di wilayah hukum Polres tersebut;

$\sum_{i=1}^{34} K_i$: jumlah kasus kejahatan di seluruh wilayah hukum Polres Sampang ;

$\sum_{i=1}^{34} P_i$: Jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Sampang.

Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	129.84	128.34	126.84	125.34	123.84	122.34

Dimensi	Satuan Pengukuran	Periode Pemantauan	Polarisasi
-	Kasus kejahatan per 100.000 penduduk	Triwulanan	Minimize

Sumber Data	Penghimpun Data	Pengampu Akuntabilitas
• Bagops Polres Sampang; • BPS.	Bagops Polres Sampang Pengesahan  JUNAIDI, S.H. AKP NRP 68110392	Kabagops Polres Sampang Pengesahan  JUNAIDI, S.H. AKP NRP 68110392

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Crime Rate (CRT)	TW1	CRT>40	35<CRT≤40	30<CRT≤35	25<CRT≤30	CRT≤25
	TW2	CRT>80	70<CRT≤ 80	60<CRT≤70	50<CRT≤60	CRT≤50
	TW3	CRT>120	105<CRT≤120	90<CRT≤105	75<CRT≤90	CRT≤75
	TW4	CRT>160	140<CRT≤160	120<CRT≤140	100<CRT≤120	CRT≤100

3. Tingkat Rasa Aman Masyarakat

Indikator Kinerja	Tingkat rasa aman masyarakat
Definisi	
Rasa aman masyarakat adalah kondisi dimana masyarakat baik perorangan maupun kelompok tidak mendapatkan ancaman keamanan atau bahaya dari kejahatan yang terjadi di lingkungannya, baik terhadap keselamatan terhadap diri maupun benda. <i>Spektrum</i> ancaman keamanan mencakup empat aspek, yaitu <i>Security</i> (aman dari gangguan atau ancaman), <i>Safety</i> (selamat dari kecelakaan dan bencana), <i>Surety</i> (jaminan adanya kepastian hukum), dan <i>Peace</i> (suasana damai dan tentram). <i>Spektrum</i> ancaman terhadap keamanan dapat digambarkan mulai dari potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata.	

Dengan.....



Dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, maka kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat serta mereka laporkan, meliputi:

- kejahatan konvensional/nasional;
- kejahatan transnasional;
- kejahatan berimplikasi kontingensi;
- pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Tingkat rasa aman masyarakat merupakan persepsi masyarakat terhadap sejumlah variabel berikut:

V₁: keberadaan Polisi pada jam rawan kejahatan (survei ke masyarakat);

V₂: tingkat pemberdayaan masyarakat (upaya Polres Sampang dalam meningkatkan peran serta masyarakat/polmas) (survei ke masyarakat);

V₃: dukungan fasilitas umum (survei ke masyarakat).

Data yang diperlukan dalam pengukuran indikator kinerja ini (dan penyedia data):

- data terkait pelaksanaan survei tingkat persepsi rasa aman penduduk beraktivitas di area tempat tinggalnya (PIC: Puslitbang Polri).

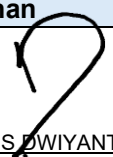
Formula

$$P = \frac{RV_1 + RV_2 + RV_3}{3}$$

$$RV_k = \left(\frac{\sum_{i=1}^5 R_i \times N_i}{5 \times \sum_{i=1}^5 N_i} \right) \times 100; \quad k = 1, 2, 3$$

- P : Tingkat rasa aman masyarakat;
- RV₁ : Nilai dari variabel V₁ (skala 0 - 100);
- RV₂ : Nilai dari variabel V₂ (skala 0 - 100);
- RV₃ : Nilai dari variabel V₃ (skala 0 - 100);
- R_i : *Rating* i yang diberikan pada suatu pernyataan kuesioner yang menggunakan Skala Likert 1-5;
- N_i : Jumlah pernyataan kuesioner yang memperoleh *rating* i;
- $\sum_{i=1}^5 R_i \times N_i$: Total penjumlahan dari perkalian *rating* i dengan jumlah pernyataan yang memberikan *rating* i;
- $\sum_{i=1}^5 N_i$: Total penjumlahan pernyataan kuesioner yang memperoleh *rating* i.

Formula digunakan oleh Puslitbang Polri.

Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	90.07	90.27	90.47	90.67	90.87	91.07
Dimensi	Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi	
-	-		Triwulanan		Maximize	
Sumber Data		Penghimpun Data		Pengampu Akuntabilitas		
• Puslitbang Polri		Bagren Polres Sampang		Kabagren Polres Sampang		
		Pengesahan		Pengesahan		
		 ARIES DWIYANTO, S.H. KOMPOL NRP 68050014		 ARIES DWIYANTO, S.H. KOMPOL NRP 68050014		

Konversi.....



Konversi indikator ke (skala 1-5)	nilai indeks	1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Tingkat rasa aman masyarakat	TW1	P ≤ 80	80 < P ≤ 90	90 < P ≤ 96	96 < P ≤ 98	P > 98
	TW2	P ≤ 80	80 < P ≤ 90	90 < P ≤ 96	96 < P ≤ 98	P > 98
	TW3	P ≤ 80	80 < P ≤ 90	90 < P ≤ 96	96 < P ≤ 98	P > 98
	TW4	P ≤ 80	80 < P ≤ 90	90 < P ≤ 96	96 < P ≤ 98	P > 98

1. Indeks Harkamtibmas

Indikator Kinerja	Indeks Harkamtibmas					
Definisi						
Indeks Harkamtibmas mengukur kinerja Polres Sampang dalam melakukan upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Indikator ini mencerminkan kemampuan Polres Sampang menjalankan fungsi <i>pre-emptif</i> dan <i>preventif</i>. Indeks Harkamtibmas dihitung dari rata-rata dari nilai indeks indikator kinerja pembentuk dimensi Harkamtibmas. Indikator kinerja pembentuk dimensi Harkamtibmas adalah sebagai berikut: X₁ : <i>Road Safety Index</i>; X₂ : indeks <i>community policing</i>; X₃ : tingkat efektivitas kehadiran Samapta Polres Sampang ; X₄ : tingkat keamanan di wilayah perairan Polres Sampang; X₅ : tingkat efektivitas pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu; X₆ : persentase reduksi potensi gangguan; X₇ : tingkat keberhasilan operasi kepolisian; X₈ : tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polres Sampang (aspek Harkamtibmas).						
Formula						
$IH = \frac{\sum_{k=1}^n X_k}{8}$ IH : indeks Harkamtibmas; X_k : nilai indeks masing-masing indikator kinerja dalam dimensi Harkamtibmas. Formula di atas berlaku untuk perhitungan Indeks Harkamtibmas untuk level nasional. Catatan: Dengan menggunakan skala 1–100, nilai <i>baseline</i> adalah 59. Karena Indeks Harkamtibmas 2025-2029 menggunakan skala baru, yakni 1–5, maka <i>baseline</i> tersebut <i>ekuivalen</i> menjadi 2,95.						
Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	3.10	3.13	3.17	3.21	3.24	3.28
Dimensi	Satuan Pengukuran			Periode Pemantauan	Polarisasi	
Harkamtibmas	Indeks (1-5)			Triwulanan	Maximize	
Sumber Data			Penghimpun Data	Pengampu Akuntabilitas		
Satuan Fungsi (Satfung) yang mengampu indikator kinerja dalam Dimensi Harkamtibmas			Bagren Polres Sampang	Kabagren Polres Sampang		
			Pengesahan	Pengesahan		
			 ARIES DWIYANTO, S.H. KOMPOL NRP 68050014			
			 ARIES DWIYANTO, S.H. KOMPOL NRP 68050014			

Rentang.....

1.1. Road Safety Index

Konversi.....

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas per 100.000 penduduk	TW1	> 3,00	>1,75 – 3,00	>0,50 – 1,75	>0,01 – 0,50	≤0,01
	TW2	>8,00	>5,50 – 8,00	>3,00 – 5,50	>0,50 – 3,00	≤0,50
	TW3	>13,00	>9,25 – 13,00	>5,50 – 9,25	>1,75 – 5,50	≤1,75
	TW4	>18,00	>13,00 – 18,00	>8,00 – 13,00	>3,00 – 8,00	≤3,00
Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas per 10.000 kendaraan	TW1	>0,75	>0,58 – 0,75	>0,38 – 0,58	>0,25 – 0,38	0,25 ≤ 0,18
	TW2	>1,50	>1,15 – 1,50	>0,75 – 1,15	>0,50 – 0,75	0,50 ≤ 0,35
	TW3	>2,25	>1,73 – 2,25	>1,13 – 1,73	>0,75 – 1,13	0,75 ≤ 0,53
	TW4	>3,00	>2,30 – 3,00	>1,50 – 2,30	>1,00 – 1,50	1,00 ≤ 0,70
Tingkat luka berat akibat kecelakaan lalu lintas per 1.000.000 penduduk	TW1	>17,05	>10,00 – 17,05	>3,00 – 10,00	>0,05 – 3,00	≤0,05
	TW2	>45,50	>31,50 – 45,50	>17,05 – 31,50	>3,00 – 17,05	≤3,00
	TW3	>73,95	>53,00 – 73,95	>31,50 – 53,00	>10,00 – 31,50	≤10,00
	TW4	>102,50	>75,00 – 102,50	>45,50 – 75,00	>17,05 – 45,50	≤17,05

1.2. Indeks *Community Policing*

Indikator Kinerja	Indeks <i>Community Policing</i>
Definisi	
Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang pemolisian masyarakat (<i>community policing</i>) yang selanjutnya disebut Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polres Sampang dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. Dalam menilai efektivitas dan implementasi pemolisian masyarakat dalam suatu wilayah digunakan Indeks <i>Community Policing</i>. Indeks <i>Community Policing</i> ini mengukur kinerja dari kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polres Sampang dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalah. Dalam implementasi pemolisian masyarakat, ada peran serta dan keterlibatan Bhabinkamtibmas dan petugas Polmas. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Sedangkan petugas Polmas adalah anggota Polri dengan golongan kepangkatan Bintara atau Perwira yang disiapkan dan ditugaskan di suatu kawasan/wilayah untuk menyelenggarakan pemolisian masyarakat, membangun komunitas yang dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam meniadakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban, menciptakan ketenteraman, serta mendukung terwujudnya kualitas hidup masyarakat. Selain itu, mengacu pada Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Pamswakarsa, kini pos Kamling berubah menjadi Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) yang merupakan bentuk pengamanan swakarsa membantu Polri dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan masyarakat seperti Siskamling dan lainnya akan lebih bermakna lagi apabila diimbangi dengan program Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang merupakan sebuah forum beranggotakan masyarakat itu sendiri yang dibina langsung oleh Polsek wilayahnya, melalui Bhabinkamtibmas.	

Komponen.....



Komponen penilaian (Z_i) dari Indeks *Community Policing* adalah sebagai berikut:

- Z_1 : persentase pemenuhan Bhabinkamtibmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai untuk setiap desa atau kelurahan;
- Z_2 : persentase pemenuhan frekuensi kunjungan (sambang/door-to-door system) oleh Bhabinkamtibmas sesuai dengan yang ditetapkan;
- Z_3 : persentase pemenuhan Petugas Polmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai dalam suatu kawasan/wilayah;
- Z_4 : persentase revitalisasi Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) di setiap desa;
- Z_5 : persentase pemenuhan kegiatan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus (Polsus).

Data yang diperlukan dalam pengukuran setiap komponen penilaian (dan penyedia data):

- data terkait jumlah Bhabinkamtibmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai (PIC: Satbinmas Polres Sampang);
- data terkait frekuensi kunjungan Bhabinkamtibmas (Satbinmas Polres Sampang);
- data terkait jumlah petugas Polmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai (Satbinmas Polres Sampang);
- data terkait jumlah pemenuhan Satkamling di setiap desa (Satbinmas Polres Sampang);
- data terkait pelaksanaan kegiatan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Polsus (Satbinmas Polres Sampang).

Formula

$$CP = \frac{\sum_{j=1}^m P_j}{m} \quad P_j = \sum_{i=1}^n w_i \times Z_i \quad Z_i = \frac{X_i}{Y_i} \times 100\%$$

CP : Indeks *Community Policing*;

P_j : Indeks *Community Policing* pada suatu Polres;

m : jumlah Polsek;

w_i : bobot komponen penilaian ke- i dari Indeks *Community Policing* ($w_1=20\%$, $w_2=25\%$, $w_3=20\%$, $w_4=25\%$, $w_5=10\%$);

Z_i : nilai komponen penilaian ke- i dari Indeks *Community Policing*;

Z_1 : persentase pemenuhan Bhabinkamtibmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai untuk setiap desa atau kelurahan;

X_1 : jumlah Bhabinkamtibmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai untuk setiap desa atau kelurahan;

Y_1 : jumlah seluruh desa Kabupaten Sampang;

Z_2 : persentase pemenuhan frekuensi kunjungan (sambang/door-to-door system) oleh Bhabinkamtibmas yang sesuai dengan yang ditetapkan;

X_2 : jumlah kunjungan (sambang/door-to door system) yang telah dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas;

Y_2 : jumlah kunjungan (sambang/door-to door system) oleh Bhabinkamtibmas yang telah ditetapkan;

Z_3 : persentase pemenuhan Petugas Polmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai dalam suatu kawasan/wilayah;

X_3 : jumlah petugas Polmas yang telah dibekali peningkatan kemampuan dan/atau pelatihan yang sesuai;

Y_3 : jumlah keseluruhan Petugas Polmas saat ini;

Z_4 : persentase revitalisasi Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) di setiap desa;

X_4 : jumlah Satkamling pasif yang dapat direvitalisasi;

Y_4 : jumlah keseluruhan satkamling pasif;

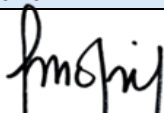
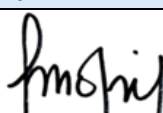
Z_5 : persentase pemenuhan kegiatan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Polsus;

X_5 : jumlah kegiatan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap terhadap Polsus yang terpenuhi;

Y_5 : jumlah keseluruhan kegiatan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap terhadap Polsus yang direncanakan untuk dilaksanakan.

Target.....



Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	80.46	80.71	80.96	81.21	81.46	81.71
Dimensi	Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi	
Harkamtibmas	Nilai (No)		Triwulanan		Maximize	
Sumber Data		Penghimpun Data		Pengampu Akuntabilitas		
• Satbinmas Polres Sampang		Satbinmas Polres Sampang		Kasatbinmas Polres Sampang		
		Pengesahan		Pengesahan		
		 MOHAMMAD MOHNI, S.P.D. AKP NRP 68120413		 MOHAMMAD MOHNI, S.P.D. AKP NRP 68120413		

Konversi indikator indeks (skala 1-5)	nilai ke	1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Indeks Community Policing	TW1	CP ≤ 60	60 < CP ≤ 80	80 < CP ≤ 90	90 < CP ≤ 95	CP > 95
	TW2	CP ≤ 60	60 < CP ≤ 80	80 < CP ≤ 90	90 < CP ≤ 95	CP > 95
	TW3	CP ≤ 60	60 < CP ≤ 80	80 < CP ≤ 90	90 < CP ≤ 95	CP > 95
	TW4	CP ≤ 60	60 < CP ≤ 80	80 < CP ≤ 90	90 < CP ≤ 95	CP > 95

1.3. Tingkat efektivitas kehadiran Samapta Polres Sampang

Indikator Kinerja	Tingkat efektivitas kehadiran Samapta Polres Sampang
Definisi	
Tingkat efektivitas kehadiran Samapta Polres Sampang merujuk pada seberapa efektif kehadiran Samapta Polres Sampang dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pelaksanaan patroli Samapta Polres Sampang dan kesiapsiagaan Polisi hadir di TKP. Terkait patroli Samapta Polres Sampang, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli. Patroli adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri, sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, yang disebabkan oleh adanya potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi, dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata yang memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian. Komponen penilaian (S_i) dari Tingkat efektivitas kehadiran Samapta Polres Sampang, yaitu: • S₁: tingkat kejadian gangguan kamtibmas per 100 giat patroli Samapta; • S₂: tingkat pemenuhan <i>response time</i> kehadiran Polisi di TKP sesuai kondisi wilayah. Data yang diperlukan dalam pengukuran setiap komponen penilaian (dan penyedia data): • data terkait jumlah tindak kejahatan (PIC: Satsamapta Polres Sampang); • data terkait jumlah giat Patroli Samapta (PIC: Satsamapta Polres Sampang); • data <i>response time</i> kehadiran Polisi di TKP sesuai kondisi wilayah (Satsamapta Polres Sampang).	
Formula	
$PS = \frac{\sum_{j=1}^m P_j}{m}$ $P_j = \frac{w_1 \times X_1 + w_2 \times X_2}{5} \times 100\%$	

PS.....



- PS : tingkat efektivitas kehadiran Samapta Polres Samping ;
 P_j : tingkat efektivitas kehadiran Samapta Polres Samping pada Polsek ke-j;
 m : jumlah Polres;
 w_i : bobot komponen dari Tingkat efektivitas kehadiran Samapta Polres Samping (w₁=60%, w₂=40%);
 X₁ : nilai indeks dari S₁ (skala 1-5);
 X₂ : nilai indeks dari S₂ (skala 1-5).

$$S_1 = \frac{K \times 100}{G}$$

$$S_2 = \frac{H}{T} \times 100\%$$

- S₁ : tingkat kejadian gangguan Kamtibmas per 100 giat patroli Samapta;
 K : jumlah kejadian gangguan Kamtibmas dalam periode tertentu;
 G : total giat Patroli Samapta dalam periode tertentu;
 S₂ : tingkat pemenuhan *response time* kehadiran Polisi di TKP sesuai kondisi wilayah;
 H : Jumlah kehadiran Polisi di TKP yang sesuai dengan *response time*;
 T : Total kehadiran Polisi di TKP.

Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	80	80.25	80.50	80.75	81	81.25
Dimensi	Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi	
Harkamtibmas	-		Triwulanan		Maximize	
Sumber Data	Penghimpun Data			Pengampu Akuntabilitas		
Satsamapta Polres Sampang	Satsamapta Polres Sampang			Kasat Samapta Polres Sampang		
	Pengesahan			Pengesahan		
	 SLAMET, S.H. AKP NRP 69060281			 SLAMET, S.H. AKP NRP 69060281		

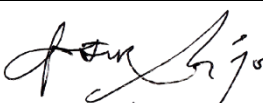
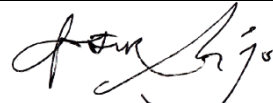
Konversi indikator ke indeks (skala 1-5)	nilai	1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Tingkat efektivitas kehadiran Samapta Polres Samping (PS)	TW1	PS < 40	40 ≤ PS < 60	60 ≤ PS < 80	80 ≤ PS < 90	90 ≤ PS ≤ 100
	TW2	PS < 40	40 ≤ PS < 60	60 ≤ PS < 80	80 ≤ PS < 90	90 ≤ PS ≤ 100
	TW3	PS < 40	40 ≤ PS < 60	60 ≤ PS < 80	80 ≤ PS < 90	90 ≤ PS ≤ 100
	TW4	PS < 40	40 ≤ PS < 60	60 ≤ PS < 80	80 ≤ PS < 90	90 ≤ PS ≤ 100
Tingkat kejadian gangguan kamtibmas per 100 giat patroli Samapta (S ₁) (*)	TW1	S ₁ > 150	100 < S ₁ ≤ 150	20 < S ₁ ≤ 100	5 < S ₁ ≤ 20	S ₁ ≤ 5
	TW2	S ₁ > 150	100 < S ₁ ≤ 150	20 < S ₁ ≤ 100	5 < S ₁ ≤ 20	S ₁ ≤ 5
	TW3	S ₁ > 150	100 < S ₁ ≤ 150	20 < S ₁ ≤ 100	5 < S ₁ ≤ 20	S ₁ ≤ 5
	TW4	S ₁ > 150	100 < S ₁ ≤ 150	20 < S ₁ ≤ 100	5 < S ₁ ≤ 20	S ₁ ≤ 5



Tingkat pemenuhan <i>response time</i> kehadiran Polisi di TKP sesuai kondisi wilayah. (S_2)	TW1	$S_2 \leq 70$	$70 < S_2 \leq 80$	$80 < S_2 \leq 90$	$90 < S_2 \leq 95$	$S_2 > 95$
	TW2	$S_2 \leq 70$	$70 < S_2 \leq 80$	$80 < S_2 \leq 90$	$90 < S_2 \leq 95$	$S_2 > 95$
	TW3	$S_2 \leq 70$	$70 < S_2 \leq 80$	$80 < S_2 \leq 90$	$90 < S_2 \leq 95$	$S_2 > 95$
	TW4	$S_2 \leq 70$	$70 < S_2 \leq 80$	$80 < S_2 \leq 90$	$90 < S_2 \leq 95$	$S_2 > 95$

(*) Angka konversi di atas dapat dikaji kembali berdasarkan pada data riil di lapangan

1.4. Tingkat Keamanan di Wilayah Perairan Polres Sampang

Indikator Kinerja	Tingkat keamanan di wilayah perairan Polres Sampang					
Definisi						
Tingkat keamanan di wilayah perairan Polres Sampang adalah jumlah kasus tindak pidana di wilayah perairan Polres Sampang per 10.000 jam kegiatan patroli.						
Wilayah perairan yang dilaksanakan patroli oleh Satpolairud meliputi seluruh wilayah perairan di wilayah hukum Polres Sampang.						
Data yang diperlukan dalam pengukuran indikator kinerja ini (dan penyedia data):						
• Data terkait durasi kegiatan patroli di wilayah perairan Polres Sampang (PIC: Satpolairud Polres Sampang); • Data terkait jumlah kasus tindak pidana di wilayah perairan Polres Sampang (PIC: Satpolairud Polres Sampang).						
Formula						
$T = \frac{K \times 10.000}{D}$						
T : tingkat keamanan di wilayah perairan Polres Sampang;						
K : jumlah kasus tindak pidana di wilayah perairan Polres Sampang;						
D : total durasi kegiatan patroli (dalam jam) di wilayah perairan Polres Sampang.						
Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	21	20	19	18	17	16
Dimensi	Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi	
Harkamtibmas	Kasus tindak pidana per 10.000 jam patroli di wilayah perairan Polres Sampang		Triwulanan		Minimize	
Sumber Data		Penghimpun Data		Pengampu Akuntabilitas		
• Satpolairud Polres Sampang		Satpolairud Polres Sampang		Kasat Polairud Polres Sampang		
		Pengesahan		Pengesahan		
		 CATUR RAHARDJO, S.H. AKP NRP 80120766		 CATUR RAHARDJO, S.H. AKP NRP 80120766		

Konversi.....



Konversi indikator ke nilai indeks (skala 1-5)		1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Tingkat keamanan di wilayah perairan Jawa Timur	TW1	T > 28	21 < T ≤ 28	14 < T ≤ 21	8 < T ≤ 14	T ≤ 8
	TW2	T > 28	21 < T ≤ 28	14 < T ≤ 21	8 < T ≤ 14	T ≤ 8
	TW3	T > 28	21 < T ≤ 28	14 < T ≤ 21	8 < T ≤ 14	T ≤ 8
	TW4	T > 28	21 < T ≤ 28	14 < T ≤ 21	8 < T ≤ 14	T ≤ 8

1.5. Tingkat Efektivitas Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu

Indikator Kinerja	Tingkat efektivitas pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu
Definisi	
Tingkat efektivitas pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu merujuk pada seberapa besar efektivitas upaya berupa kegiatan pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu terhadap ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban. Pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu mencakup serangkaian langkah dan strategi yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons potensi kejadian kejahatan dan gangguan Kamtibmas terhadap objek vital nasional dan objek tertentu, serta memastikan kelangsungan operasional dan keselamatan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yang dimaksud dengan gangguan Kamtibmas adalah kejahatan, pelanggaran dan gangguan terhadap ketentraman/ketertiban umum. Adapun golongan kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan konvensional. Sedangkan gangguan terhadap ketenteraman/ketertiban umum mencakup antara lain unjuk rasa, kecelakaan kerja, penyerobotan lahan dan lainnya. Pemenuhan pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu mencakup pengamanan pada objek <i>VIP</i> berupa fasilitas atau infrastruktur yang krusial bagi keamanan nasional, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangkit listrik, rumah sakit, dan jaringan transportasi, pariwisata dan penyelenggaraan kegiatan yang bersifat nasional dan internasional. Komponen penilaian (Z_i) dari Tingkat efektivitas pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu, yaitu: • Z_1: persentase pemenuhan pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu; • Z_2: tingkat keamanan objek vital nasional dan objek tertentu. Data yang diperlukan dalam untuk indikator kinerja ini (dan penyedia data): • data jumlah giat pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu (<i>PIC</i>: Satsamapta Polres Sampang); • data terkait jumlah gangguan Kamtibmas pada suatu objek vital nasional dan objek tertentu (<i>PIC</i>: Satsamapta Polres Sampang).	
Formula	
(Skala Indeks 1-5) $OV = \left(\frac{w_1 \times X_1 + w_2 \times X_2}{5} \right) \times 100\%$ $Z_1 = \frac{X}{Y} \times 100\%$ $Z_2 = \frac{K \times 10.000}{D}$ OV: Tingkat efektivitas pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu; w_i : Bobot dari komponen OV ($w_1=60\%$, $w_2= 40\%$); X_1 : Nilai indeks dari Z_1; X_2 : Nilai indeks dari Z_2; Z_1 : persentase pemenuhan pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu pada periode tertentu; X : jumlah realisasi giat pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu pada periode tertentu; Y : total target giat pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu pada periode tertentu;	

Z_2



Z_2 : tingkat keamanan objek vital nasional dan objek tertentu, yaitu proporsi jumlah gangguan kamtibmas yang terjadi per 10.000 giat pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu;

K : jumlah gangguan kamtibmas pada suatu objek vital nasional dan objek tertentu dalam periode tertentu;

D : total giat pengamanan pada seluruh objek vital nasional dan objek tertentu dalam periode tertentu.

Catatan:

- Jika tidak terdapat gangguan kamtibmas pada suatu objek vital nasional dan objek tertentu dalam periode tertentu (aman), Maka bobot dari komponen OV dari ($w_1=60\%$, $w_2=40\%$) menjadi ($w_1=100\%$, $w_2=0\%$);
- konversi nilai Z_1 dan Z_2 ke berturut-turut nilai indeks X_1 dan X_2 dapat dilihat pada tabel konversi di bawah.

Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	70	70.50	71	71.50	72	72.50
Dimensi	Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi	
Harkamtibmas	-		Triwulanan		Maximize	
Sumber Data		Penghimpun Data		Pengampu Akuntabilitas		
• Satsamapta Polres Sampang		Satsamapta Polres Sampang		Kasat Samapta Polres Sampang		
		Pengesahan		Pengesahan		
		 SLAMET, S.H. AKP NRP 69060281		 SLAMET, S.H. AKP NRP 69060281		

Konversi indikator ke indeks (skala 1-5)	nilai	1,0—< 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Tingkat efektivitas pengamanan obyek vital dan target rentan (OV) (*)	TW1	$OV < 40$	$40 \leq OV < 60$	$60 \leq OV < 80$	$80 \leq OV < 90$	$90 \leq OV \leq 100$
	TW2	$OV < 40$	$40 \leq OV < 60$	$60 \leq OV < 80$	$80 \leq OV < 90$	$90 \leq OV \leq 100$
	TW3	$OV < 40$	$40 \leq OV < 60$	$60 \leq OV < 80$	$80 \leq OV < 90$	$90 \leq OV \leq 100$
	TW4	$OV < 40$	$40 \leq OV < 60$	$60 \leq OV < 80$	$80 \leq OV < 90$	$90 \leq OV \leq 100$
Persentase pemenuhan pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu (Z_1) (*)	TW1	$Z_1 \leq 70$	$70 < Z_1 \leq 80$	$80 < Z_1 \leq 95$	$95 < Z_1 \leq 98$	$Z_1 > 98$
	TW2	$Z_1 \leq 70$	$70 < Z_1 \leq 80$	$80 < Z_1 \leq 95$	$95 < Z_1 \leq 98$	$Z_1 > 98$
	TW3	$Z_1 \leq 70$	$70 < Z_1 \leq 80$	$80 < Z_1 \leq 95$	$95 < Z_1 \leq 98$	$Z_1 > 98$
	TW4	$Z_1 \leq 70$	$70 < Z_1 \leq 80$	$80 < Z_1 \leq 95$	$95 < Z_1 \leq 98$	$Z_1 > 98$
Tingkat keamanan objek vital nasional dan objek tertentu (Z_2) (*)	TW1	$Z_2 > 9$	$7 < Z_2 \leq 9$	$5 < Z_2 \leq 7$	$3 < Z_2 \leq 5$	$Z_2 \leq 3$
	TW2	$Z_2 > 9$	$7 < Z_2 \leq 9$	$5 < Z_2 \leq 7$	$3 < Z_2 \leq 5$	$Z_2 \leq 3$
	TW3	$Z_2 > 9$	$7 < Z_2 \leq 9$	$5 < Z_2 \leq 7$	$3 < Z_2 \leq 5$	$Z_2 \leq 3$
	TW4	$Z_2 > 9$	$7 < Z_2 \leq 9$	$5 < Z_2 \leq 7$	$3 < Z_2 \leq 5$	$Z_2 \leq 3$

(*) Angka konversi di atas dapat diperbarui berdasarkan data riil di lapangan

1.6. Persentase.....



1.6. Persentase Reduksi Potensi Gangguan

Indikator Kinerja	Persentase reduksi potensi gangguan					
Definisi						
Reduksi Potensi Gangguan adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan melalui penyidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk menanggulangi potensi gangguan yang dapat mengganggu terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Persentase reduksi potensi gangguan menilai efektivitas dalam kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan dalam mencegah dan menanggulangi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Persentase Reduksi Potensi Gangguan mengukur selisih antara perkiraan potensi gangguan yang terjadi secara nyata/menonjol dari seluruh perkiraan potensi gangguan yang telah teridentifikasi dibandingkan dengan jumlah perkiraan potensi gangguan teridentifikasi. Ruang lingkup dari indikator ini adalah potensi gangguan kamtibmas di bidang: (1) politik, (2) ekonomi, (3) sosial budaya, dan (4) keamanan. Nilai indikator dihitung sebagai jumlah total penurunan potensi gangguan untuk seluruh bidang. Data komponen penilaian: • Data terkait proyeksi potensi gangguan untuk seluruh bidang (Satintelkam Polres Sampang); • Data terkait Jumlah kejadian gangguan nyata/menonjol diseluruh bidang (Satintelkam Polres Sampang).						
Formula						
$P = \frac{(\sum G_n - \sum R_n)}{\sum G_n} \times 100\%$ P : persentase Reduksi Potensi Gangguan; $\sum G_n$: proyeksi potensi gangguan untuk seluruh bidang; $\sum R_n$: jumlah kejadian gangguan nyata/menonjol untuk seluruh bidang.						
Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	65.83	66.03	66.23	66.43	66.63	66.83
Dimensi		Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi
Harkamtibmas		Persentase (%)		Triwulanan		Maximize
Sumber Data		Penghimpun Data			Pengampu Akuntabilitas	
Satintelkam Polres Sampang		Satintelkam Polres Sampang			Kasat Intelkam Polres Sampang	
		Pengesahan			Pengesahan	
		 HANDOKO BUDI PRASETIYO, S.Si., M.M. AKP NRP 79071586			 HANDOKO BUDI PRASETIYO, S.Si., M.M. AKP NRP 79071586	

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0-<2,0	2,0 - < 3,0	3,0 - < 4,0	4,0 - < 4,5	4,5 - 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Persentase reduksi potensi gangguan	TW1	P < 45%	45%≤P<65%	65%≤P<85%	85%≤P<92,5%	92,5%≤P<100%
	TW2	P < 45%	45%≤P<65%	65%≤P<85%	85%≤P<92,5%	92,5%≤P<100%
	TW3	P < 45%	45%≤P<65%	65%≤P<85%	85%≤P<92,5%	92,5%≤P<100%
	TW4	P < 45%	45%≤P< 65%	65%≤P<85%	85%≤P<92,5%	92,5%≤P<100%

8. Tingkat.....



1.7. Tingkat Keberhasilan Operasi Kepolisian

Indikator Kinerja	Tingkat keberhasilan operasi kepolisian
Definisi	Operasi Kepolisian adalah serangkaian kegiatan Polres Sampang yang diorganisasikan secara khusus dalam rangka pencegahan, penanggulangan, dan penindakan terhadap gangguan Kamtibmas. Operasi diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran/target operasi, cara bertindak, kekuatan personel, dukungan logistik, dan anggaran tertentu. Manajemen Operasi Kepolisian adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan operasi kepolisian Tingkat keberhasilan operasi kepolisian mengukur kemampuan Polres Sampang dalam menggelar operasi yang bersifat <i>ad-hoc</i> maupun menjalankan operasional yang bersifat rutin. Yang menjadi cakupan adalah kegiatan operasi dan operasional pada pada ranah Harkamtibmas maupun Gakkum. Indikator kinerja ini mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem, Manajemen, dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian. Sesuai dengan Peraturan Kapolri tersebut, perhitungan indikator ini melibatkan faktor yang disebut dengan <i>side-effect</i>, yakni dampak yang merugikan masyarakat atas digelarnya operasi atau kegiatan operasional. Tingkat keberhasilan operasi kepolisian dihitung dari komponen berikut: K1 = Nilai Keberhasilan Target Operasi (NKTO); K2 = Nilai Keberhasilan Jumlah/Kemampuan Personel (NKJKP); K3 = Nilai Keberhasilan Anggaran (NKA); K4 = Nilai Keberhasilan Sarana Prasarana (NKSP); K5 = Nilai Keberhasilan Pilun (NKP). Data Komponen penilaian: • Data target operasi, jumlah/kemampuan personel, anggaran, sarana dan prasarana, dan pilun; • Data <i>side-effect</i> dari penyelenggaraan operasi atau operasional.
Formula	$TK = NK - SS$ $NK = \frac{NKTO + NKJKP + NKA + NKSP + NKP}{5}$ TK : tingkat keberhasilan operasi kepolisian; NK : nilai Keberhasilan; SS : jumlah kejadian <i>side-effect</i>; NKTO : Nilai Keberhasilan Target Operasi; NKJKP: Nilai Keberhasilan Jumlah/Kemampuan Personel; NKA : Nilai Keberhasilan Anggaran; NKSP : Nilai Keberhasilan Sarana Prasarana; NKP : Nilai Keberhasilan Pilun. $NKTO = \frac{CTO}{JTO} \times 100$ NKTO : Nilai Keberhasilan Target Operasi; CTO : Capaian Target Operasi; JTO : Jumlah Target Operasi yang ditetapkan. $NKJKP = \frac{CJKP}{JTJKP} \times 100$ NKJKP : Nilai Keberhasilan Jumlah/Kemampuan Personel; CJKP : Capaian Jumlah/Kemampuan Personel; JTJKP : Jumlah Target Jumlah/Kemampuan Personel.

NKA.....



$$NKA = \frac{JAYT}{JAYD} \times 100$$

NKA : Nilai Keberhasilan Anggaran;
 JAYTJ: Jumlah anggaran yang tersedia;
 JAYD : Jumlah anggaran yang dibutuhkan.

$$NKSP = \frac{JSPT}{JSPD} \times 100$$

NKSP : Nilai Keberhasilan Sarana Prasarana;
 JSPT : Jumlah Sarana Prasarana yang Tersedia;
 JSPD : Jumlah Sarana Prasarana yang Ditetapkan.

$$NKP = \frac{JPYD}{JPYS} \times 100$$

NKP : Nilai Keberhasilan Pilun;
 JPYD : Jumlah Pilun Yang Dibuat;
 JPYS : Jumlah Pilun Yang Seharusnya.

Sumber: Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian.

Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	90	90.20	90.40	90.60	90.80	91
Dimensi	Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi	
Harkamtibmas	-		Triwulanan		Maximize	
Sumber Data		Penghimpun Data		Pengampu Akuntabilitas		
Bagops Sampang Polres	Bagops Polres Sampang		Kabagops Polres Sampang			
	Pengesahan		Pengesahan			
	 JUNAIDI, S.H. AKP NRP 68110392		 JUNAIDI, S.H. AKP NRP 68110392			

Konversi indikator ke nilai indeks (skala 1-5)		1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Tingkat keberhasilan operasi kepolisian	TW1	TK < 80%	80≤TK<90%	90≤TK<95%	95≤TK<98%	TK ≥ 98%
	TW2	TK < 80%	80≤TK<90%	90≤TK<95%	95≤TK<98%	TK ≥ 98%
	TW3	TK < 80%	80≤TK<90%	90≤TK<95%	95≤TK<98%	TK ≥ 98%
	TW4	TK < 80%	80≤TK<90%	90≤TK<95%	95≤TK<98%	TK ≥ 98%

1.8. Tingkat.....



1.8. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Polres Sampang (Aspek Harkamtibmas)

Indikator Kinerja	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polres Sampang (aspek Harkamtibmas)					
Definisi						
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polres Sampang (aspek Harkamtibmas) mengukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polres Sampang dalam melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Indikator kinerja ini terdiri dari lima sub-indikator sebagai berikut:						
Sub-Indikator		Substansi				
Bukti Langsung (Tangibles)		- fasilitas fisik; - personel Polres Sampang yang memadai secara kuantitas; - sarana komunikasi terkait layanan kepolisian (misalnya: nomor pengaduan Polisi berfungsi).				
Keandalan (Reliability)		- layanan kepolisian yang memuaskan (berorientasi pada akurasi hasil); - layanan kepolisian diberikan tepat waktu.				
Daya Tanggap (Responsiveness)		- kesediaan menolong (helping); - kesediaan menginformasikan hal-hal yang relevan dengan layanan kepolisian (courtesy); - empati (kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik).				
Jaminan (Assurance)		pengetahuan, kesopanan dan dapat dipercaya.				
Kesesuaian (Conformance)		prosedur (SOP, Slogan, dan sebagainya) dan biaya.				
Kelima sub-indikator tersebut diterapkan untuk mengukur layanan dari fungsi Harkamtibmas berikut: Lantas, Intel, Samapta, dan Binmas. Survei untuk memperoleh data dilaksanakan berdasarkan metodologi yang dikembangkan oleh Puslitbang Polri . Penilaian berdasarkan dokumen terkait hasil Survei Kepuasan Masyarakat Aspek Harkamtibmas (Puslitbang) .						
Formula						
$T = \sum_{i=1}^5 K_i$ T : tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polres Sampang (aspek Harkamtibmas); K_i : rerata dari kepuasan masyarkat terhadap sub-indikator (K₁ = Bukti Langsung, K₂ = Keandalan, K₃ = Daya Tanggap, K₄ = Jaminan, K₅ = Kesesuaian).						
Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	49.78	50.28	50.78	51.28	51.78	52.28
Dimensi	Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi	
Harkamtibmas	Nilai (No)		Triwulanan		Maximize	
Sumber Data		Penghimpun Data		Pengampu Akuntabilitas		
Puslitbang Polri		Bagren Polres Sampang		Kabagren Polres Sampang		
		Pengesahan		Pengesahan		
		 ARIES DWIYANTO, S.H. KOMPOL NRP 68050014		 ARIES DWIYANTO, S.H. KOMPOL NRP 68050014		

Konversi.....



Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0–<2,0	2,0–<3,0	3,0–<4,0	4,0–<4,5	4,5–5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polres Sampang (aspek Harkamtibmas)	TW1	T < 65,0	65,0≤T<77,5	77,5≤T<90,0	90,0≤T<95,0	95,0≤T≤100,0
	TW2	T < 65,0	65,0≤T<77,5	77,5≤T<90,0	90,0≤T<95,0	95,0≤T≤100,0
	TW3	T < 65,0	65,0≤T<77,5	77,5≤T<90,0	90,0≤T<95,0	95,0≤T≤100,0
	TW4	T < 65,0	65,0≤T<77,5	77,5≤T<90,0	90,0≤T<95,0	95,0≤T≤100,0

2. Indeks Gakkum Polres Samping

Indikator Kinerja	Indeks Gakkum Polres Sampang						
Definisi							
Indeks Gakkum Polres Sampang mengukur kinerja Polres Sampang dalam menyelesaikan kasus kejahatan dan tindak pidana. Indeks Gakkum Polres Sampang dihitung dari rata-rata dari nilai indeks indikator kinerja pembentuk dimensi Gakkum Polres Sampang .							
Indikator kinerja atau komponen pembentuk dimensi Gakkum Polres Sampang adalah sebagai berikut:							
X ₁ : <i>clearance rate</i> kejahatan konvensional;							
X ₂ : <i>clearance rate</i> kejahatan transnasional (Siber, Narkoba, TPPO);							
X ₃ : <i>clearance rate</i> kejahatan terhadap perempuan dan anak (PPA);							
X ₄ : <i>clearance rate</i> kejahatan kekayaan negara (korupsi, minerba);							
X ₅ : <i>clearance rate</i> tindak pidana lantas;							
X ₆ : <i>clearance rate</i> tindak pidana di wilayah perairan Polres Sampang;							
X ₇ : tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polres Sampang (aspek Gakkum Polres Sampang).							
Formula							
$IG = \frac{\sum_{k=1}^7 X_k}{7}$							
IG : Indeks Gakkum Polres Sampang ;							
X _k : nilai indeks masing-masing indikator kinerja dalam dimensi Gakkum Polres Sampang .							
Catatan:							
Dengan menggunakan skala 1–100, nilai <i>baseline</i> adalah 60. Karena Indeks Gakkum Polres Sampang untuk 2025-2029 menggunakan skala baru, yakni 1–5, maka <i>baseline</i> tersebut ekuivalen dengan 3.00.							
Target Kinerja		Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
		3.31	3.35	3.38	3.41	3.44	3.47
Dimensi		Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi	
Gakkum Polres Sampang		-		Triwulanan		Maximize	
Sumber Data		Penghimpun Data			Pengampu Akuntabilitas		
- Satreskrim, - Satresnarkoba, - Satlantas, - Satpolairud - Polres Sampang.		Bagren Polres Sampang			Kabagren Polres Sampang		
		Pengesahan			Pengesahan		
		 ARIES DWIYANTO, S.H. KOMPOL NRP 68050014			 ARIES DWIYANTO, S.H. KOMPOL NRP 68050014		

Rentang.....

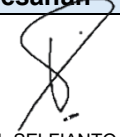
Rentang per Level Kinerja	Nilai	Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Indeks Gakkum Polres Sampang	TW1	1,00 – 1,99	2,00 – 2,99	3,00 – 4,24	4,25 – 4,74	4,75 – 5,00
	TW2	1,00 – 1,99	2,00 – 2,99	3,00 – 4,24	4,25 – 4,74	4,75 – 5,00
	TW3	1,00 – 1,99	2,00 – 2,99	3,00 – 4,24	4,25 – 4,74	4,75 – 5,00
	TW4	1,00 – 1,99	2,00 – 2,99	3,00 – 4,24	4,25 – 4,74	4,75 – 5,00

2.1. Clearance Rate Kejahatan Konvensional

Indikator Kinerja	Clearance Rate Kejahatan Konvensional
Definisi	<i>Clearance rate</i> adalah proporsi jumlah kasus atau peristiwa kejahatan yang selesai ditangani oleh Polisi dibandingkan dengan jumlah total kasus kejahatan (<i>crime total</i>) yang terjadi. <i>Clearance rate</i> dihitung secara terpisah untuk setiap jenis tindak pidana, yakni: konvensional, transnasional, terhadap perempuan dan anak (PPA), kekayaan negara, lantas, di wilayah perairan Polres Sampang, dan kasus terorisme. Kejahatan konvensional adalah kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri. <i>Clearance rate</i> kejahatan konvensional dengan penyelesaian kasus yang harus ditangani dalam satu tahun, baik yang berjalan (baru) maupun yang tunggakan (tertunda). <i>Clearance rate</i> adalah kasus atau peristiwa kejahatan yang telah mencapai pada tahapan sebagai berikut: P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap selanjutnya tersangka dan barang bukti diserahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU) untuk dilakukan penuntutan), Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), <i>Restorative Justice (RJ)</i>, <i>Alternative Dispute Resolution (ADR)</i>. Ruang lingkup <i>Clearance rate</i> dalam manual ini mencakup seluruh kejadian kejahatan konvensional di wilayah hukum Polres Sampang. Sumber data: jumlah kasus atau peristiwa kejahatan konvensional tahun berjalan dan tahun sebelumnya diambil dari data Bagops, Satreskrim, Satnarkoba, Satlantas dan Satpolair Polres Sampang. Sumber: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
Formula	$X_1 = \frac{KS}{KD} \times 100\%$ X_1 : <i>Clearance Rate</i> kejahatan konvensional; KS : jumlah kasus Kejahatan Konvensional yang selesai pada tahun berjalan; KD : jumlah kasus Kejahatan Konvensional yang perlu ditangani/diselesaikan pada tahun berjalan. KS = KB + KT KS : Jumlah kasus Kejahatan Konvensional yang selesai pada tahun berjalan; KB : Jumlah penyelesaian kasus Kejahatan Konvensional yang masuk pada tahun berjalan dan selesai pada tahun berjalan; KT : Jumlah penyelesaian kasus Kejahatan Konvensional tahun sebelumnya yang selesai pada tahun berjalan. KD = KM + KP KD : Jumlah kasus Kejahatan Konvensional yang perlu ditangani/diselesaikan pada tahun berjalan; KM : Jumlah kasus Kejahatan Konvensional yang masuk pada tahun berjalan; KP : Jumlah kasus Kejahatan Konvensional tahun sebelumnya yang ditangani pada tahun berjalan.

Target.....



Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	61.30	61.80	62.30	62.80	63.30	63.80
Dimensi		Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi
Gakkum Polres Sampang		Persentase (%)		Triwulanan		Maximize
Sumber Data		Penghimpun Data			Pengampu Akuntabilitas	
Satreskrim Polres Sampang.		Satreskrim Polres Sampang			Kasat Reskrim Polres Sampang	
		Pengesahan			Pengesahan	
		 SAFRIL SELFANTO, S.H., M.M. AKP NRP 75040701			 SAFRIL SELFANTO, S.H., M.M. AKP NRP 75040701	

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,25	4,25 – < 4,75	4,75 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Clearance rate kejahatan konvensional	TW1	C < 30%	30% ≤ C < 60%	60% ≤ C < 85%	85% ≤ C < 95%	C ≥ 95%
	TW2	C < 30%	30% ≤ C < 60%	60% ≤ C < 85%	85% ≤ C < 95%	C ≥ 95%
	TW3	C < 30%	30% ≤ C < 60%	60% ≤ C < 85%	85% ≤ C < 95%	C ≥ 95%
	TW4	C < 30%	30% ≤ C < 60%	60% ≤ C < 85%	85% ≤ C < 95%	C ≥ 95%

2.2. Clearance Rate Kejahatan Transnasional

Indikator Kinerja	Clearance Rate Kejahatan Transnasional
Definisi	
<i>Clearance rate</i> adalah proporsi jumlah kasus atau peristiwa kejahatan yang selesai ditangani oleh Polisi dibandingkan dengan jumlah total kasus kejahatan (<i>crime total</i>) yang terjadi. <i>Clearance rate</i> dihitung secara terpisah untuk setiap jenis tindak pidana, yakni: konvensional, transnasional, terhadap perempuan dan anak (PPA), kekayaan negara, lantas, di wilayah perairan Polres Sampang, dan kasus terorisme. Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang terorganisir, yang wilayah operasinya meliputi beberapa negara, yang berdampak kepada kepentingan politik, pemerintahan, sosial budaya dan ekonomi suatu negara dan bersifat global, serta dengan maraknya kasus perjudian indikator ini dapat digunakan untuk mengukur <i>clearance rate</i> terhadap kasus judi <i>online</i>. <i>Clearance rate</i> kejahatan transnasional dengan penyelesaian kasus yang harus ditangani dalam satu tahun, baik yang berjalan (baru) maupun yang tunggakan (tertunda). <i>Clearance rate</i> adalah kasus atau peristiwa kejahatan yang telah mencapai salah satu status berikut: P21 dan SP3. Ruang lingkup <i>Clearance rate</i> dalam manual ini mencakup seluruh kejadian kejahatan transnasional di wilayah hukum Polres Sampang. Sumber data: jumlah kasus atau peristiwa kejahatan transnasional tahun berjalan dan tahun sebelumnya diambil dari data Satresnarkoba dan Satreskrim Polres Sampang. Sumber: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.	

Formula.....



Formula	
$X_2 = \frac{KS}{KD} \times 100\%$	
X_2	: Clearance Rate kejahatan transnasional;
KS	: jumlah kasus Kejahatan Transnasional yang selesai pada tahun berjalan;
KD	: jumlah kasus Kejahatan Transnasional yang perlu ditangani/diselesaikan pada tahun berjalan.
$KS = KB + KT$	
KS	: jumlah kasus Kejahatan Transnasional yang selesai pada tahun berjalan;
KB	: jumlah penyelesaian kasus Kejahatan Transnasional yang masuk pada tahun berjalan dan selesai pada tahun berjalan
KT	: jumlah penyelesaian kasus Kejahatan Transnasional tahun sebelumnya yang selesai pada tahun berjalan
$KD = KM + KP$	
KD	: jumlah kasus Kejahatan Transnasional yang perlu ditangani/diselesaikan pada tahun berjalan;
KM	: jumlah kasus Kejahatan Transnasional yang masuk pada tahun berjalan;
KP	: jumlah kasus Kejahatan Transnasional tahun sebelumnya yang ditangani pada tahun berjalan.

Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	80	80.50	81	81.50	82	82.50
Dimensi	Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi	
Gakkum Sampang Polres	Persentase (%)		Triwulanan		Maximize	
Sumber Data		Penghimpun Data		Pengampu Akuntabilitas		
• Satresnarkoba Sampang Polres	Satresnarkoba Sampang Polres		Kasat Narkoba Sampang Polres			
	Pengesahan		Pengesahan			
	 HERY INDRATULLOH MAULIDA, S.M. AKP NRP 84110411		 HERY INDRATULLOH MAULIDA, S.M. AKP NRP 84110411			

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,25	4,25 – < 4,75	4,75 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Clearance rate Kejahatan Transnasional	TW1	C < 30%	30%≤C<60%	60%≤C<85%	85%≤C<95%	C ≥ 95%
	TW2	C < 30%	30%≤C<60%	60%≤C<85%	85%≤C<95%	C ≥ 95%
	TW3	C < 30%	30%≤C<60%	60%≤C<85%	85%≤C<95%	C ≥ 95%
	TW4	C < 30%	30%≤C<60%	60%≤C<85%	85%≤C<95%	C ≥ 95%

2.3. Clearance.....

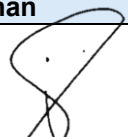
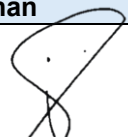
2.3. Clearance Rate Kejahatan terhadap Perempuan dan Anak

Indikator Kinerja	Clearance Rate Kejahatan terhadap Perempuan dan Anak
Definisi	<i>Clearance rate</i> adalah proporsi jumlah kasus atau peristiwa kejahatan yang selesai ditangani oleh Polisi dibandingkan dengan jumlah total kasus kejahatan (<i>crime total</i>) yang terjadi. <i>Clearance rate</i> dihitung secara terpisah untuk setiap jenis tindak pidana, yakni: konvensional, transnasional, terhadap perempuan dan anak (PPA), kekayaan negara, lantas, di wilayah perairan Polres Sampang, dan kasus terorisme. Kejahatan terhadap perempuan dan anak (PPA) adalah tindakan yang melanggar hukum, menyakiti, mengeksploitasi, merugikan, menyebabkan penderitaan, dan/atau kesengsaraan perempuan dan anak baik secara fisik, mental, seksual, emosional, dan/atau penelantaran rumah tangga. <i>Clearance rate</i> kejahatan terhadap perempuan dan anak dengan penyelesaian kasus yang harus ditangani dalam satu tahun, baik yang berjalan (baru) maupun yang tunggakan (tertunda). <i>Clearance rate</i> adalah kasus atau peristiwa kejahatan yang telah mencapai salah satu status berikut: P21, SP3 dan <i>Restorative Justice (RJ)</i>. Ruang lingkup <i>Clearance rate</i> dalam manual ini mencakup seluruh kejadian kejahatan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Sampang. Sumber data: jumlah kasus atau peristiwa kejahatan terhadap perempuan dan anak (PPA) tahun berjalan dan tahun sebelumnya diambil dari data Satreskrim Polres Sampang. Sumber: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
Formula	$X_3 = \frac{KS}{KD} \times 100\%$ X_3 : <i>Clearance Rate</i> kejahatan terhadap perempuan dan anak; KS : jumlah kasus Kejahatan terhadap Perempuan dan Anak yang selesai pada tahun berjalan; KD : jumlah kasus Kejahatan terhadap Perempuan dan Anak yang perlu ditangani/ diselesaikan pada tahun berjalan. KS = KB + KT KS : jumlah kasus Kejahatan terhadap Perempuan dan Anak yang selesai pada tahun berjalan; KB : jumlah penyelesaian kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak yang masuk pada tahun berjalan dan selesai pada tahun berjalan; KT : Jumlah penyelesaian kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak tahun sebelumnya yang selesai pada tahun berjalan. KD = KM + KP KD : jumlah kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak yang perlu ditangani/ diselesaikan pada tahun berjalan; KM : jumlah kasus Kejahatan terhadap Perempuan dan Anak yang masuk pada tahun berjalan; KP : jumlah kasus kejahatan terhadap Perempuan dan Anak tahun sebelumnya yang ditangani pada tahun berjalan.

Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	60	61	62	63	64	65
Dimensi		Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi
Gakkum Sampang Polres		Persentase (%)		Triwulanan		Maximize

Sumber.....



Sumber Data	Penghimpun Data	Pengampu Akuntabilitas
• Satreskrim Polres Sampang.	Satreskrim Polres Sampang	Kasat Reskrim Polres Sampang
	Pengesahan	Pengesahan
	 SAFRIL SELFANTO, S.H., M.M. AKP NRP 75040701	 SAFRIL SELFANTO, S.H., M.M. AKP NRP 75040701

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0—<2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,25	4,25 – < 4,75	4,75 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Clearance Rate Kejahatan terhadap Perempuan dan Anak	TW1	C < 30%	30%≤C<60%	60%≤C<85%	85%≤C<95%	C ≥ 95%
	TW2	C < 30%	30%≤C<60%	60%≤C<85%	85%≤C<95%	C ≥ 95%
	TW3	C < 30%	30%≤C<60%	60%≤C<85%	85%≤C<95%	C ≥ 95%
	TW4	C < 30%	30%≤C<60%	60%≤C<85%	85%≤C<95%	C ≥ 95%

2.4. Clearance Rate Kejahatan Kekayaan Negara

Indikator Kinerja	Clearance Rate Kejahatan Kekayaan Negara
Definisi	
<i>Clearance rate</i> adalah proporsi jumlah kasus atau peristiwa kejahatan yang selesai ditangani oleh Polisi dibandingkan dengan jumlah total kasus kejahatan (<i>crime total</i>) yang terjadi. <i>Clearance rate</i> dihitung secara terpisah untuk setiap jenis tindak pidana, yakni: konvensional, transnasional, terhadap perempuan dan anak (PPA), kekayaan negara, lantasan, di wilayah perairan Polres Sampang, dan kasus terorisme. Kejahatan terhadap kekayaan negara adalah kejahatan yang berdampak kepada kerugian negara yang dilakukan oleh perorangan, secara bersama-sama, dan/atau korporasi (suatu badan). <i>Clearance rate</i> kejahatan kekayaan negara dengan penyelesaian kasus yang harus ditangani dalam satu tahun, baik yang berjalan (baru) maupun yang tunggakan (tertunda). <i>Clearance rate</i> adalah kasus atau peristiwa kejahatan yang telah mencapai salah satu status berikut: P21 dan SP3. Ruang lingkup <i>Clearance rate</i> dalam manual ini mencakup seluruh kejadian kejahatan kekayaan negara di wilayah hukum Polres Sampang . Sumber data: jumlah kasus atau peristiwa kejahatan kekayaan negara tahun berjalan dan tahun sebelumnya diambil dari data Satreskrim Polres Sampang (korupsi dan minerba) . Sumber: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.	
Formula	
$X_4 = \frac{KS}{KD} \times 100\%$ X_4 : <i>Clearance Rate</i> kejahatan kekayaan negara; KS : jumlah kasus Kejahatan Kekayaan Negara yang selesai pada tahun berjalan; KD : jumlah kasus Kejahatan Kekayaan Negara yang perlu ditangani/diselesaikan pada tahun berjalan. KS = KB + KT KS : jumlah kasus Kejahatan Kekayaan Negara yang selesai pada tahun berjalan; KB : jumlah penyelesaian kasus Kejahatan Kekayaan Negara yang masuk pada tahun berjalan dan selesai pada tahun berjalan; KT : jumlah penyelesaian kasus Kejahatan Kekayaan Negara tahun sebelumnya yang selesai pada tahun berjalan.	

KD.....



	KD = KM + KP
KD	: jumlah kasus Kejahatan Kekayaan Negara yang perlu ditangani/diselesaikan pada tahun berjalan;
KM	: jumlah kasus Kejahatan Kekayaan Negara yang masuk pada tahun berjalan;
KP	: jumlah kasus Kejahatan Kekayaan Negara tahun sebelumnya yang ditangani pada tahun berjalan.

Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	70	70.50	71	71.50	72	72.50
Dimensi	Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi	
Gakkum Polres Sampang	Persentase (%)		Triwulanan		Maximize	
Sumber Data		Penghimpun Data		Pengampu Akuntabilitas		
Satreskrim Polres Sampang.		Satreskrim Polres Sampang		Kasat Reskrim Polres Sampang		
		Pengesahan		Pengesahan		
		 <u>SAFRIL SELFANTO, S.H., M.M.</u> AKP NRP 75040701		 <u>SAFRIL SELFANTO, S.H., M.M.</u> AKP NRP 75040701		

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0—<2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,25	4,25 – < 4,75	4,75 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Clearance Rate Kejahatan Kekayaan Negara	TW1	C < 30%	30%≤C<60%	60%≤C<85%	85%≤C<95%	C ≥ 95%
	TW2	C < 30%	30%≤C<60%	60%≤C<85%	85%≤C<95%	C ≥ 95%
	TW3	C < 30%	30%≤C<60%	60%≤C<85%	85%≤C<95%	C ≥ 95%
	TW4	C < 30%	30%≤C<60%	60%≤C<85%	85%≤C<95%	C ≥ 95%

2.5. Clearance Rate Tindak Pidana Lantas

Indikator Kinerja	Clearance rate tindak pidana lant
Definisi	
<i>Clearance rate</i> adalah proporsi jumlah kasus atau peristiwa kejahatan yang selesai ditangani oleh Polisi dibandingkan dengan jumlah total kasus kejahatan (<i>crime total</i>) yang terjadi. <i>Clearance rate</i> dihitung secara terpisah untuk setiap jenis tindak pidana, yakni: konvensional, transnasional, terhadap perempuan dan anak (PPA), kekayaan negara, lant, di wilayah perairan Polres Sampang, dan kasus terorisme. Tindak pidana lant adalah kecelakaan lalu lintas yang tergolong dalam kategori kecelakaan lalu lintas ringan, sedang, dan berat. <i>Clearance rate</i> tindak pidana lant mengacu pada komponen berikut: X₁ : <i>Clearance rate</i> tindak pidana lant tahun berjalan; X₂ : <i>Clearance rate</i> tindak pidana lant tahun sebelumnya. <i>Clearance rate</i> adalah kasus atau peristiwa kejahatan yang telah mencapai salah satu status berikut: P21, SP3, <i>Restorative Justice</i> (RJ), <i>Alternative Dispute Resolution</i> (ADR), Berita Acara Cepat (BAC). Ruang lingkup <i>Clearance rate</i> dalam manual ini mencakup seluruh kejadian tindak pidana lant di wilayah hukum Polres Sampang.	

Sumber.....

Sumber data: jumlah kasus atau peristiwa kejahatan tindak pidana lantah tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang diambil dari data Satlantas Polres Sampang .
 Sumber: Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Formula

$$C = \sum_{i=1}^2 w_i \times X_i$$

C : *clearance rate* tindak pidana lantah;

w_i : bobot masing-masing komponen dari *clearance rate* tindak pidana lantah ($w_1 = 70\%$, $w_2 = 30\%$);

X_i : nilai masing-masing komponen dari *clearance rate* tindak pidana lantah.

$$X_1 = \frac{KB}{TB} \times 100\% \quad X_2 = \frac{KS}{TS} \times 100\%$$

KB : jumlah kasus atau peristiwa tindak pidana lantah di tahun berjalan yang selesai ditangani oleh Satlantas Polres Sampang;

KS : jumlah kasus tunggakan tindak pidana lantah di tahun sebelumnya yang selesai ditangani oleh Satlantas Polres Sampang;

TB : jumlah total kasus tindak pidana lantah yang terjadi di tahun berjalan;

TS : jumlah total kasus tunggakan tindak pidana lantah tahun sebelumnya.

Catatan:

- Jika tidak terdapat tunggakan kasus, bobot masing-masing komponen dari *clearance rate* tindak pidana dari ($w_1=70\%$, $w_2= 30\%$) menjadi ($w_1=100\%$, $w_2= 0\%$).

Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	80	80.50	81	81.50	82	82.50
Dimensi	Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi	
Gakkum Sampang Polres	Persentase (%)		Triwulanan		Maximize	
Sumber Data		Penghimpun Data		Pengampu Akuntabilitas		
• Satlantas Polres Sampang .		Satlantas Polres Sampang		Kasat Lantass Polres Sampang		
		Pengesahan		Pengesahan		
		 <u>SIGIT EKAN SAHUDI, S.H., M.M.</u> AKP NRP 81120128		 <u>SIGIT EKAN SAHUDI, S.H., M.M.</u> AKP NRP 81120128		

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)	1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
	Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Clearance rate tindak pidana lantah	TW1	$C < 30\%$	$30\% \leq C < 60\%$	$60\% \leq C < 85\%$	$85\% \leq C < 95\%$
	TW2	$C < 30\%$	$30\% \leq C < 60\%$	$60\% \leq C < 85\%$	$85\% \leq C < 95\%$
	TW3	$C < 30\%$	$30\% \leq C < 60\%$	$60\% \leq C < 85\%$	$85\% \leq C < 95\%$
	TW4	$C < 30\%$	$30\% \leq C < 60\%$	$60\% \leq C < 85\%$	$85\% \leq C < 95\%$

2.6. Clearance.....

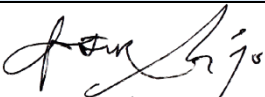
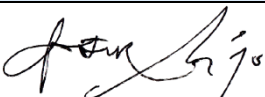


2.6. Clearance Rate Tindak Pidana di Wilayah Perairan Polres Sampang

Indikator Kinerja	Clearance rate tindak pidana di wilayah perairan Jawa Timur
Definisi	<i>Clearance rate</i> adalah proporsi jumlah kasus atau peristiwa kejahatan yang selesai ditangani oleh Polisi dibandingkan dengan jumlah total kasus kejahatan (<i>crime total</i>) yang terjadi. <i>Clearance rate</i> dihitung secara terpisah untuk setiap jenis tindak pidana, yakni: konvensional, transnasional, terhadap perempuan dan anak (PPA), kekayaan negara, lantasi, di wilayah perairan Polres Sampang, dan kasus terorisme. Tindak pidana di wilayah perairan Jawa Timur adalah kejahatan yang terjadi di wilayah perairan Jawa Timur termasuk sungai, danau, wilayah Laut Jawa, dan perbatasan. <i>Clearance rate</i> tindak pidana di wilayah perairan Jawa Timur mengacu pada komponen berikut: X1 : <i>Clearance rate</i> tindak pidana di wilayah perairan Polres Sampang tahun berjalan; X2 : <i>Clearance rate</i> tindak pidana di wilayah perairan Polres Sampang tahun sebelumnya. <i>Clearance rate</i> adalah kasus atau peristiwa kejahatan yang telah mencapai salah satu status berikut: P21, SP3, <i>Restorative Justice (RJ)</i>, <i>Alternative Dispute Resolution (ADR)</i>, Berita Acara Cepat (BAC). Ruang lingkup <i>Clearance rate</i> dalam manual ini mencakup seluruh kejadian tindak pidana di wilayah perairan Polres Sampang.. Sumber data: jumlah kasus atau peristiwa kejahatan tindak pidana di wilayah perairan Polres Sampang yang di ambil dari data Satpolairud Polres Sampang. Sumber: Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
Formula	$C = \sum_{i=1}^2 w_i \times X_i$ C : <i>clearance rate</i> tindak pidana di wilayah perairan Jawa Timur; w_i : bobot masing-masing komponen dari <i>clearance rate</i> tindak pidana di wilayah perairan Polres Sampang (w₁ = 70%, w₂ = 30%); X_i : nilai masing-masing komponen dari <i>clearance rate</i> tindak pidana di wilayah perairan Polres Sampang. $X_1 = \frac{KB}{TB} \times 100\% \quad X_2 = \frac{KS}{TS} \times 100\%$ KB : jumlah kasus atau peristiwa tindak pidana di wilayah perairan Polres Sampang di tahun berjalan yang selesai ditangani oleh Satpolairud Polres Sampang ; KS : jumlah kasus tunggakan tindak pidana di wilayah perairan Polres Sampang di tahun sebelumnya yang selesai ditangani oleh Satpolairud Polres Sampang; TB : jumlah total kasus tindak pidana di wilayah perairan Polres Sampang yang terjadi di tahun berjalan; TS : jumlah total kasus tunggakan tindak pidana di wilayah perairan Polres Sampang tahun sebelumnya. Catatan: - Jika tidak terdapat tunggakan kasus, bobot masing-masing komponen dari <i>clearance rate</i> tindak pidana dari (w₁=70%, w₂= 30%) menjadi (w₁=100%, w₂= 0%).

Target.....



Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	75	76	77	78	79	80
Dimensi	Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi	
Gakkum Sampang	Polres	Persentase (%)	Triwulanan		Maximize	
Sumber Data	Penghimpun Data		Pengampu Akuntabilitas			
• Satpolairud Sampang .	Polres	Satpolairud Polres Sampang	Kasat Polairud Polres Sampang			
		Pengesahan	Pengesahan			
		 CATUR RAHARDJO, S.H. AKP NRP 80120766	 CATUR RAHARDJO, S.H. AKP NRP 80120766			

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)	1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5	
Clearance rate tindak pidana di wilayah perairan Jawa Timur	TW1 C < 40%	40% ≤ C < 75%	75% ≤ C < 90%	90% ≤ C < 95%	C ≥ 95%
	TW2 C < 40%	40% ≤ C < 75%	75% ≤ C < 90%	90% ≤ C < 95%	C ≥ 95%
	TW3 C < 40%	40% ≤ C < 75%	75% ≤ C < 90%	90% ≤ C < 95%	C ≥ 95%
	TW4 C < 40%	40% ≤ C < 75%	75% ≤ C < 90%	90% ≤ C < 95%	C ≥ 95%

2.7. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Polres Sampang (Aspek Gakkum Polres Sampang)

Indikator Kinerja	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polres Sampang (aspek Gakkum Polres Sampang)
Definisi	
Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Polres Sampang (Aspek Gakkum Polres Sampang) mengukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polres Sampang dalam melakukan penegakan hukum. Indikator kinerja ini terdiri dari lima sub-indikator sebagai berikut:	
Sub-indikator	Substansi
Bukti Langsung (<i>Tangibles</i>)	▪ fasilitas fisik; ▪ personel Polres Sampang yang memadai secara kuantitas; ▪ sarana komunikasi terkait layanan kepolisian (misalnya: nomor pengaduan Polisi berfungsi).
Keandalan (<i>Reliability</i>)	▪ layanan kepolisian yang memuaskan (berorientasi pada akurasi hasil); ▪ layanan kepolisian diberikan tepat waktu.
Daya Tanggap (<i>Responsiveness</i>)	▪ kesediaan menolong (<i>helping</i>); ▪ kesediaan menginformasikan hal-hal yang relevan dengan layanan kepolisian (<i>courtesy</i>); ▪ empati (kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik).
Jaminan (<i>Assurance</i>)	pengetahuan, kesopanan, dapat dipercaya, dan berintegritas.
Kesesuaian (<i>Conformance</i>)	prosedur (SOP, slogan, dan sebagainya) dan biaya.

Kelima.....



Kelima sub-indikator tersebut diterapkan untuk mengukur layanan dari fungsi Gakkum Polres Sampang yakni Satreskrim. Survei untuk memperoleh data dilaksanakan berdasarkan metodologi yang dikembangkan oleh Puslitbang Polri.

Penilaian berdasarkan dokumen terkait hasil **survei kepuasan masyarakat aspek Gakkum (Puslitbang Polri)**.

Formula

$$T = \sum_{i=1}^5 K_i$$

T : tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polres Sampang (aspek Gakkum Polres Sampang);

K_i : rerata dari kepuasan masyarakat terhadap sub-indikator (K₁ = Bukti Langsung, K₂ = Keandalan, K₃ = Daya Tanggap, K₄ = Jaminan, K₅ = Kesesuaian).

Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	57.45	57.95	58.45	58.95	59.45	59.95

Dimensi	Satuan Pengukuran	Periode Pemantauan	Polarisasi
Gakkum Polres Sampang	Nilai (No)	Triwulanan	Maximize

Sumber Data	Penghimpun Data	Pengampu Akuntabilitas
• Puslitbang Polri	Bagren Polres Sampang	Kabagren Polres Sampang
	Pengesahan	Pengesahan
	 ARIES DWIYANTO, S.H. KOMPOL NRP 68050014	 ARIES DWIYANTO, S.H. KOMPOL NRP 68050014

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polres Sampang (aspek Gakkum Polres Sampang)	TW1	25,00≤T<43,75	43,75≤T<62,50	62,50≤T<81,25	81,25≤T<90,00	T ≥ 90
	TW2	25,00≤T<43,75	43,75≤T<62,50	62,50≤T<81,25	81,25≤T<90,00	T ≥ 90
	TW3	25,00≤T<43,75	43,75≤T<62,50	62,50≤T<81,25	81,25≤T<90,00	T ≥ 90
	TW4	25,00≤T<43,75	43,75≤T<62,50	62,50≤T<81,25	81,25≤T<90,00	T ≥ 90

3. Indeks.....



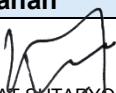
3. Indeks *Human Capital*

Indikator Kinerja	Indeks <i>Human Capital</i>					
Definisi						
Indeks <i>Human Capital</i> merupakan pengukuran kinerja dari Indeks Profesionalitas SDM						
Pengembangan sumber daya manusia mencakup aspek pendidikan dan pelatihan di berbagai jenjang, serta pengembangan kompetensi personil Polres Sampang . Pengelolaan sumber daya manusia mencakup kemampuan Polres Sampang untuk memberikan layanan SDM yang berkualitas, baik kepada satuan kerja maupun individu personel Polres Sampang , serta menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif.						
Indeks <i>Human Capital</i> merupakan rata-rata nilai indeks dari :						
Indeks Profesionalitas SDM Polres Sampang;						
Formula						
$IHC = \frac{\sum_{i=1}^1 X_i}{1}$						
IHC : Indeks <i>Human Capital</i> ;						
X_i merupakan nilai indeks dari indikator kinerja berikut:						
X_1 : Indeks Profesionalitas SDM Polres Sampang.						
Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	3.52	3.53	3.54	3.55	3.56	3.57
Dimensi	Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi	
Kinerja Penunjang	Indeks (1-5)		Tahunan		Maximize	
Sumber Data	Penghimpun Data			Pengampu Akuntabilitas		
Bag SDM Polres Sampang	Bag SDM Polres Sampang			KabagSDM Sampang Polres		
	Pengesahan			Pengesahan		
	 KUAT SUTARYO, S.H. KOMPOL NRP 71010222			 KUAT SUTARYO, S.H. KOMPOL NRP 71010222		

Rentang per Level Kinerja	Nilai	Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Indeks <i>Human Capital</i>	TW1	-	-	-	-	-
	TW2	-	-	-	-	-
	TW3	-	-	-	-	-
	TW4	1,00 – 1,99	2,00 – 2,99	3,00 – 3,99	4,00 – 4,49	4,50 – 5,00

3.1. Indeks

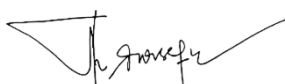
3.1. Indeks Profesionalitas SDM Polres Sampang

Indikator Kinerja		Indeks Profesionalitas SDM Polres Sampang					
Definisi							
Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Indeks Profesionalitas SDM Polri, Indeks Profesionalitas SDM Polres Sampang adalah pengukuran yang ditetapkan untuk mengukur kualitas sikap, derajat pengetahuan, dan keahlian yang dimiliki oleh SDM Polres Sampang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Sumber data: • K : SIPK bagi anggota Polres Sampang dan e-kinerja bagi PNS Polres Sampang dari Subbagbinkar Bag SDM Polres Sampang ; • D : Data pelanggaran kode etik atau pelanggaran disiplin PNPP dari Bidpropam Polres Sampang ; • R : Data penilaian rohani dari Subbagwatpers Bag SDM Polres Sampang (e-rohani); • P : Data penilaian psikologi dari Subbagwatpers Bag SDM Polres Sampang (e-mental); • J : Data penilaian jasmani dari Bagwatpers Biro SDM Polda Jatim (e-binjas); • A : Data kualifikasi dan kompetensi dari aplikasi SIPP/Satu SDM Polres Sampang .							
Formula							
$IPS = 0,30K + 0,30D + 0,09R + 0,09P + 0,15J + 0,07A$ IPS : Indeks Profesionalitas SDM; K : diperoleh dari poin rata-rata hasil penilaian kinerja semester 1 dan 2 pada tahun berjalan bagi anggota Polres Sampang , dan poin penilaian kinerja pada aplikasi penilaian kinerja Badan Kepegawaian Negara bagi PNS dan PPPK Polres Sampang ; D : diperoleh berdasarkan keterangan dan/atau dokumen pelanggaran kode etik atau pelanggaran disiplin selama satu kurun waktu penilaian kinerja. Poin dasar sebesar 75 dan berkurang seiring dengan poin pelanggaran disiplin sesuai ketentuan; R : diperoleh dari catatan penilaian rohani yang meliputi nilai perilaku, nilai pengetahuan dan wawasan, serta nilai sikap praktik keagamaan; P : diperoleh dari rata-rata penilaian kesehatan psikologi personel semester 1 dan 2 pada tahun berjalan; J : diperoleh dari hasil uji kesamaptaan jasmani dan pengukuran Indeks Masa Tubuh (IMT); A : diperoleh dari nilai atas data kualifikasi (capaian pendidikan umum kedinasan dan non kedinasan) SDM Polres Sampang dan nilai atas data kompetensi Dikbangum, Dikbangspes, dan pelatihan) SDM Polres Sampang. Sumber: Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Indeks Profesionalitas SDM Polres Sampang .							
Target Kinerja		Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
		70.44	70.64	70.84	71.04	71.24	71.44
Dimensi		Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi	
Kinerja Penunjang		-		Tahunan		Maximize	
Sumber Data		Penghimpun Data		Pengampu Akuntabilitas			
• BagSDM Polres Sampang		Bag SDM Polres Sampang		KabagSDM Polres Sampang			
		Pengesahan		Pengesahan			
		 KUAT SUTARYO, S.H. KOMPOL NRP 71010222		 KUAT SUTARYO, S.H. KOMPOL NRP 71010222			
Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0	
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5	
Indeks Profesionalitas SDM Polres Sampang	TW1	-	-	-	-	-	
	TW2	-	-	-	-	-	
	TW3	-	-	-	-	-	
	TW4	IPS < 60	60≤IPS<70	70≤IPS<80	80≤IPS≤90	IPS > 90	

4. Indeks



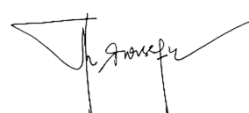
4. Indeks Infrastruktur Strategis

Indikator Kinerja	Indeks Infrastruktur Strategis					
Definisi						
Indeks Infrastruktur Strategis mengukur kemampuan organisasi Polres Sampang menerapkan dan memanfaatkan teknologi, mengembangkan inovasi, mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana, serta memanfaatkan data digital dalam rangka meningkatkan kualitas operasional organisasi, produktivitas, dan efisiensi kerja.						
Indeks ini dapat digunakan menilai tingkat kesiapan dan kemampuan organisasi untuk menjalankan transformasi digital.						
Indeks Infrastruktur Strategis dihitung berdasarkan rata-rata nilai:						
tingkat pemenuhan <i>Minimum Essential Police Equipment (MEPE)</i>;						
Formula						
$IIS = \frac{\sum_{i=1}^1 Y_i}{1}$						
IIS : Indeks Infrastruktur Strategis.						
Y _i merupakan nilai indeks dari indikator :						
Y ₁ : tingkat pemenuhan <i>Minimum Essential Police Equipment (MEPE)</i> ;						
Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	2.45	2.50	2.60	2.70	2.80	3.00
Dimensi	Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi	
Kinerja Penunjang	Indeks (1-5)		Tahunan		Maximize	
Sumber Data	Penghimpun Data			Pengampu Akuntabilitas		
Baglog Polres Sampang	Baglog Polres Sampang			Kabaglog Polres Sampang		
	Pengesahan			Pengesahan		
	 JOKO DWI AGUS SUSANTO, S.H., M.M. KOMPOL NRP 81080064			 JOKO DWI AGUS SUSANTO, S.H., M.M. KOMPOL NRP 81080064		

Rentang per Level Kinerja	Nilai	Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Indeks Infrastruktur Strategis	TW1	-	-	-	-	-
	TW2	-	-	-	-	-
	TW3	-	-	-	-	-
	TW4	1,00 – 1,99	2,00 – 2,99	3,00 – 3,99	4,00 – 4,49	4,50 – 5,00

4.1. Indeks

4.1. Tingkat Pemenuhan Minimum Essential Police Equipment (MEPE)

Indikator Kinerja	Tingkat pemenuhan <i>Minimum Essential Police Equipment (MEPE)</i>						
Definisi							
<i>Minimum Essential Police Equipment (MEPE)</i> adalah peralatan dasar yang diperlukan oleh petugas Kepolisian untuk melakukan tugasnya dengan efektif dan aman, yaitu peralatan pelindung pribadi, perangkat komunikasi, dan alat operasional lainnya yang memastikan bahwa kepolisian dapat melaksanakan peran mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban publik. Tingkat pemenuhan <i>Minimum Essential Police Equipment (MEPE)</i> dihitung berdasarkan rerata pemenuhan komponen peralatan dasar berikut: X₁: Pemenuhan terhadap Almitsus; X₂: Pemenuhan terhadap Perbekalan Umum (Kaporlap); X₃: Pemenuhan terhadap Fasilitas Konstruksi. Sumber data: hasil evaluasi terhadap pemenuhan peralatan dasar dari setiap Satker yang dilakukan oleh Baglog Polres Sampang .							
Formula							
$M = \sum_{i=1}^3 w_i \times X_i$ M : Tingkat pemenuhan <i>Minimum Essential Police Equipment (MEPE)</i>; w_i : Bobot masing-masing komponen dari Tingkat pemenuhan <i>Minimum Essential Police Equipment</i> (w₁ = 70%, w₂ = 15%, w₃ = 15%); X_i : Nilai masing-masing komponen dari Tingkat pemenuhan <i>Minimum Essential Police Equipment</i>.							
Target Kinerja		Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
		48%	50%	52%	54%	56%	60%
Dimensi		Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi	
Kinerja Penunjang		Persentase (%)		Tahunan		Maximize	
Sumber Data		Penghimpun Data		Pengampu Akuntabilitas			
Baglog Sampang Polres		Baglog Polres Sampang		Kabaglog Polres Sampang			
		Pengesahan		Pengesahan			
		 JOKO DWI AGUS SUSANTO, S.H., M.M. KOMPOL NRP 81080064		 JOKO DWI AGUS SUSANTO, S.H., M.M. KOMPOL NRP 81080064			

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0-<2,0	2,0 - < 3,0	3,0-<4,0	4,0 - < 4,5	4,5 - 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Tingkat pemenuhan <i>Minimum Essential Police Equipment</i>	TW1	M < 5	5≤M<10	10≤M<15	15≤M<20	M ≥ 20
	TW2	M < 20	20≤M<25	25≤M<35	35≤M<40	M ≥ 40
	TW3	M < 40	40≤M<45	45≤M<55	55≤M<60	M ≥ 60
	TW4	M < 60	60≤M<70	70≤M<90	90≤M<95	M ≥ 95

5. Indeks



5. Indeks Organization Capital

Indikator Kinerja	Indeks Organization Capital					
Definisi						
Indeks <i>Organization Capital</i> merupakan suatu indeks komposit yang mengagregasikan capaian kinerja seluruh Indikator Kinerja Penunjang (IKP) yang tercakup dalam sasaran strategis level Polres Sampang , yakni SS5. Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel.						
Indeks <i>Organization Capital</i> dihitung berdasarkan rata-rata nilai indeks dari indikator kinerja berikut:						
Z ₁ : Nilai <i>SAKIP</i> ;						
Z ₂ : Nilai Kinerja Anggaran;						
Z ₃ : Persentase penanganan pengaduan masyarakat;						
Z ₄ : Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polres Sampang.						
Formula						
$IOC = \frac{\sum_{i=1}^4 Z_i}{4}$						
IOC : Indeks <i>Organization Capital</i> .						
Z _i adalah nilai indeks dari indikator kinerja berikut:						
Z ₁ : Nilai <i>SAKIP</i> ;						
Z ₂ : Nilai Kinerja Anggaran;						
Z ₃ : Persentase penanganan pengaduan masyarakat;						
Z ₄ : Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polres Sampang.						
Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	3.25	3.27	3.32	3.38	3.43	3.49
Dimensi	Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi	
Kinerja Penunjang	Indeks (1-5)		Tahunan		Maximize	
Sumber Data		Penghimpun Data		Pengampu Akuntabilitas		
• Bagren, Siwas, Sikum Polres Sampang		Bagren Polres Sampang		Kabagren Polres Sampang		
		Pengesahan		Pengesahan		
		 ARIES DWIYANTO, S.H. KOMPOL NRP 68050014		 ARIES DWIYANTO, S.H. KOMPOL NRP 68050014		

Rentang per Level Kinerja	Nilai	Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Indeks <i>Organization Capital</i>	TW1	-	-	-	-	-
	TW2	-	-	-	-	-
	TW3	-	-	-	-	-
	TW4	1,00–1,99	2,00–2,99	3,00–3,99	4,00–4,49	4,50–5,00

5.1. Indeks

5.1. Nilai SAKIP

Indikator Kinerja		Nilai SAKIP	
Definisi			
Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah nilai evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Polres Sampang yang diberikan oleh KemenPANRB melalui Laporan Hasil Evaluasi SAKIP K/L/PD. Evaluasi atas implementasi SAKIP ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah (yaitu Polres Sampang) mengimplementasikan SAKIP-nya, sekaligus mendorong peningkatan pencapaian kinerja Polres Sampang yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Sesuai dengan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, komponen dan bobot dalam evaluasi manajemen kinerja atas implementasi SAKIP ditetapkan, yaitu: X₁ = Perencanaan Kinerja (Bobot:30%); X₂ = Pengukuran Kinerja (Bobot:30%); X₃ = Pelaporan Kinerja (Bobot:15%); X₄ = Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot:25%). Untuk pemenuhan penilaian, setiap sub komponen kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Nilai SAKIP yang diperoleh pada tahun berjalan merupakan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Polres Sampang tahun sebelumnya.			
No.	Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi
1.	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	>80 – 90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4.	B	>60 – 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5.	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	C	>30 – 50	Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7.	D	0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Formula



Formula

$$S = \sum_{i=1}^4 w_i \times X_i$$

S : Nilai SAKIP;
X_i : Nilai Komponen SAKIP;
w_i : Bobot Komponen.

Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	68.14	68.34	68.64	68.94	69.24	69.54

Dimensi	Satuan Pengukuran	Periode Pemantauan	Polarisasi
Kinerja Penunjang	Nilai (No)	Tahunan	Maximize

Sumber Data	Penghimpun Data	Pengampu Akuntabilitas
Siwas Polres Sampang	Siwas Polres Sampang	Kasiwas Polres Sampang
	Pengesahan	Pengesahan
	 IMAMUDDIN IPTU NRP 71080257	 IMAMUDDIN IPTU NRP 71080257

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Nilai SAKIP (S)	TW1	-	-	-	-	-
	TW2	-	-	-	-	-
	TW3	-	-	-	-	-
	TW4	0 < S ≤ 45	45 < S ≤ 65	65 < S ≤ 85	85 < S ≤ 92,5	92,5 < S ≤ 100

5.2. Nilai Kinerja Anggaran

Indikator Kinerja	Nilai Kinerja Anggaran
Definisi	
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan gabungan komponen pembentuk dari: 1. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA), yaitu dari aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART); 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yaitu dari aplikasi <i>Online Monitoring</i> Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN);	
Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu instrumen penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dilaksanakan oleh Menteri Keuangan untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Penjelasan Evaluasi Kinerja Anggaran ini dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	
IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Adapun indikator IKPA dijabarkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-5/PB/2024 Tentang Petunjuk	

Teknis



Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga.						
Data yang diperlukan dalam pengukuran indikator kinerja ini (dan penyedia data):						
• Data dari Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) (PIC: Bagren Polres Sampang); • Data dari Aplikasi <i>Online Monitoring</i> Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) Puskeu Polri (PIC: Sikeu Polres Sampang).						
Formula						
$NKA = \sum_{i=1}^2 w_i \times X_i$ NKA : Nilai Kinerja Anggaran; w_i : bobot dari komponen pembentuk Nilai Kinerja Anggaran (W₁=50%, W₂=50%); X_i : nilai indeks masing-masing komponen pembentuk Nilai Kinerja Anggaran; X₁ : nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA); X₂ : nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).						
Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	89.28	89.78	90.28	90.78	91.28	91.78
Dimensi		Satuan Pengukuran	Periode Pemantauan		Polarisasi	
Kinerja Penunjang		Nilai (No)	Tahunan		Maximize	
Sumber Data		Penghimpun Data		Pengampu Akuntabilitas		
• Bagren, Sikeu Polres Sampang		Bagren Polres Sampang		Kabagren Polres Sampang		
		Pengesahan		Pengesahan		
		 ARIES DWIYANTO, S.H. KOMPOL NRP 68050014		 ARIES DWIYANTO, S.H. KOMPOL NRP 68050014		
Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	TW1	NKA ≤ 80	80<NKA≤89	89<NKA≤95	95<NKA≤98	NKA > 98
	TW2	NKA ≤ 80	80<NKA≤89	89<NKA≤95	95<NKA≤98	NKA > 98
	TW3	NKA ≤ 80	80<NKA≤89	89<NKA≤95	95<NKA≤98	NKA > 98
	TW4	NKA ≤ 80	80<NKA≤89	89 <NKA≤95	95<NKA≤98	NKA > 98

5.3. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Penanganan Pengaduan Masyarakat

Indikator Kinerja	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat
Definisi	
Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disebut dumas adalah bentuk penerapan pengawasan masyarakat atas sumber daya manusia Polri yang disampaikan kepada Polres Sampang berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, atau keluhan terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur Polres Sampang.	

Pengelolaan



Pengelolaan Dumas di lingkungan Polres Sampang dilaksanakan terhadap dumas yang disampaikan oleh Pelapor. Dumas yang disampaikan terkait dengan: (a) pelayanan Polres Sampang ; (b) penyimpangan perilaku SDM Polres Sampang ; (c) penyalahgunaan tugas, fungsi, dan wewenang; dan/atau (d) proses penegakan hukum.

Penyelenggara pengelolaan Dumas ada pada tingkat Mabes Polri, Polda, dan Polres. Penyelenggara pada tingkat Polres Sampang adalah:

- 1) Siwas Polres Sampang;
- 2) Sipropam Polres Sampang.

Selain itu, pengaduan masyarakat disampaikan langsung, ataupun secara tidak langsung melalui surat maupun melalui portal Presisi secara *online*.

Data yang diperlukan dalam pengukuran indikator kinerja ini (dan penyedia data):

- Penilaian berdasarkan dokumen terkait hasil survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap penanganan Dumas TA 2025 dari Polda Jatim.

Formula

$$DM = \left(\frac{PD}{JD} \right) \times 100$$

DM : tingkat penyelesaian penanganan terhadap pengaduan masyarakat;

PD : Penyelesaian dumas tahun berjalan;

JD : Jumlah dumas tahun berjalan;

Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	72.86%	73.86%	74.86%	75.86%	77.86%	78.86%

Dimensi	Satuan Pengukuran	Periode Pemantauan	Polarisasi
Kinerja Penunjang	Persentase (%)	Tahunan	Maximize

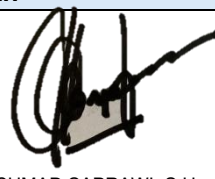
Sumber Data	Penghimpun Data	Pengampu Akuntabilitas
Siwas, Sipropam Polres Sampang	Siwas Polres Sampang	Kasiwas Polres Sampang
	Pengesahan	Pengesahan
	 IMAMUDDIN IPTU NRP 71080257	 IMAMUDDIN IPTU NRP 71080257

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0-<2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Tingkat persentase penyelesaian pengaduan masyarakat (DM)	TW1	-	-	-	-	-
	TW2	-	-	-	-	-
	TW3	-	-	-	-	-
	TW4	DM ≤60	60<DM≤68	68<DM≤84	84<DM≤92	DM > 92

5.4 Persentase.....



5.4. Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang Dihadapi Polres Samping

Indikator Kinerja	Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polres Sampang					
Definisi						
Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polres Sampang adalah proporsi jumlah total masalah hukum yang diselesaikan oleh keseluruhan Sikum Polres Sampang dalam 1 (satu) tahun anggaran. Penyelesaian masalah hukum yang dimaksud adalah melalui pemberian bantuan hukum, dan pemberian saran hukum atas masalah hukum yang dihadapi Polri dan keluarga besar Polri. Ruang lingkup pengukuran dalam penyelesaian masalah hukum adalah Sikum Polres. Data yang digunakan untuk mengukur indikator kinerja ini adalah laporan penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh Polres Sampang yang berasal Sikum Polres Polres Sampang.						
Formula						
$H = \frac{\sum_{k=1}^n S_k}{\sum_{k=1}^n H_k} \times 100\%$ H : persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polres Sampang ; S_k : jumlah masalah hukum yang diselesaikan oleh Sikum Polres Sampang ; H_k : jumlah total masalah hukum yang dihadapi Sikum Polres Sampang ; K : Sikum Polres Sampang .						
Target Kinerja	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
	80%	81%	82%	83%	84%	85%
Dimensi	Satuan Pengukuran		Periode Pemantauan		Polarisasi	
Kinerja Penunjang	Persentase (%)		Triwulanan		Maximize	
Sumber Data	Penghimpun Data			Pengampu Akuntabilitas		
Sikum Polres Sampang .	Sikum Polres Sampang			Kasikum Polres Sampang		
	Pengesahan			Pengesahan		
	 ACHMAD SAPRAWI, S.H. AKP NRP 68030545			 ACHMAD SAPRAWI, S.H. AKP NRP 68030545		

Konversi nilai indikator ke indeks (skala 1-5)		1,0 – < 2,0	2,0 – < 3,0	3,0 – < 4,0	4,0 – < 4,5	4,5 – 5,0
		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polres Samping (H)	TW1	H < 15%	15% ≤ H < 25%	25% ≤ H < 45%	45% ≤ H < 50%	H ≥ 50%
	TW2	H < 30%	30% ≤ H < 45%	45% ≤ H < 60%	60% ≤ H < 65%	H ≥ 65%
	TW3	H < 45%	45% ≤ H < 60%	60% ≤ H < 75%	75% ≤ H < 80%	H ≥ 80%
	TW4	H < 60%	60% ≤ H < 75%	75% ≤ H < 90%	90% ≤ H < 95%	H ≥ 95%

F. Penutup.....



F. Penutup

Indikator kinerja yang tercakup dalam dokumen ini adalah yang digunakan untuk mengukur pencapaian Sasaran Strategis dalam Renstra Polres Sampang 2025-2029. Manual indikator kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penjelasan detail tentang indikator kinerja tersebut. Informasi yang tersaji mencakup cara menghitung capaian kinerja Polres Sampang , antara lain: definisi, formula, polarisasi, periode pemantauan, sumber data, penghimpun data, dan pengampu akuntabilitas.

Ditetapkan di: Sampang
pada tanggal: 6 Oktober 2025
KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAMPANG POLDA JATIM

